



EKONOMI BIRU **UNTUK**
INDONESIA EMAS

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

BAWAL PUTIH



KATA PENGANTAR



P

enyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja pada tahun 2023 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon sebagai salah satu Instansi Pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai media informasi, pertanggungjawaban kinerja serta sebagai alat pengendali menuju terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan program pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

Laporan kinerja Tahun 2024 ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon pada Tahun 2024. Perjanjian kinerja tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2020-2024 dan perwujudan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode pengukuran.

Selama Tahun 2024, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagaimana tertuang dalam dua dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang terdiri perjanjian kinerja dengan Pusat Pelatihan KP terdiri dari 5 sasaran kegiatan dan 17 Indikator Kinerja Utama (IKU) serta perjanjian kinerja dengan Pusat Penyuluhan KP terdiri dari 3 sasaran kegiatan dan 9 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam laporan kinerja ini dijabarkan mengenai target dan realisasi kinerja pada Tahun 2024, keberhasilan/kegagalan program, permasalahan dan solusi serta kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

Akhir kata, semoga penyajian Laporan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dan sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi pada tahun 2024 dan umpan balik untuk terus meningkatkan kinerja kedepan secara produktif, efektif dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan, koordinasi pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi.

Ambon, 20 Januari 2025

**Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon**



Abubakar

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab:

Abubakar S.St.Pi, M.Si

Ketua:

Rahmawati Umasugi S.Pi, M.Si

Sekretaris :

Moh. Arief Hidayat A.Md, S.Pi

Anggota:

Fiona A.B. Nikyuluw S.Pi, M.Si

Dessy Rompis S.AP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
TIM PENYUSUN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
IKTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	5
1.3 Tugas dan Fungsi BPPP Ambon	6
1.4 Keragaan SDM BPPP Ambon.....	9
1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Rencana Strategis	15
2.2 Rencana Kerja Tahun 2024	22
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	22
2.4 Pengukuran Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1 Prestasi Kinerja.....	27
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	28
3.3 Akuntabilitas Keuangan.....	101
3.4 Efisiensi Anggaran	103
BAB IV PENUTUP.....	105
4.1 Capaian Kinerja Utama	105
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi.....	107
LAMPIRAN	

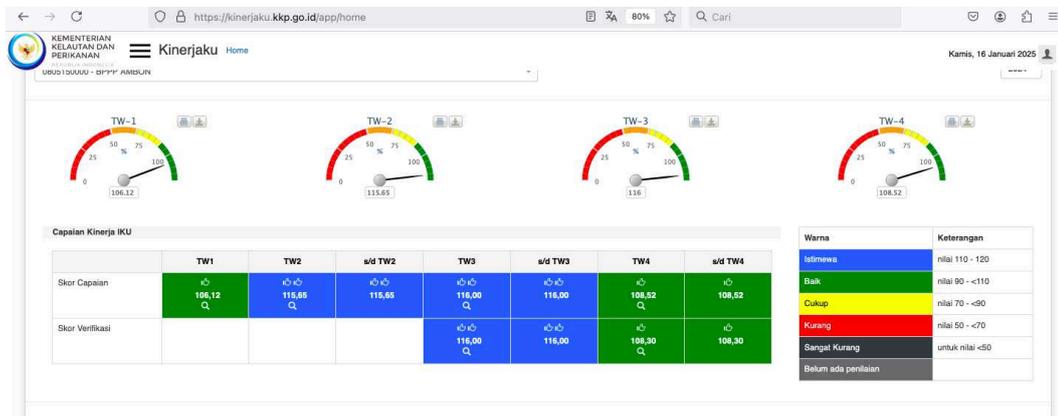
IKTISAR EKSEKUTIF

Sasaran kinerja yang dicapai pada tahun 2024 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon yaitu administrasi kepegawaian, pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan administrasi keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengelolaan kerjasama, informasi dan dokumentasi ilmiah yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkup Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

Berdasarkan perjanjian kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dengan Pusat Pelatihan KP yang terdiri dari 5 sasaran kegiatan dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) serta perjanjian kinerja dengan Pusat Penyuluhan KP yang terdiri dari 1 sasaran kegiatan dan 6 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari Sasaran Strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 26 (Dua puluh enam) indikator kinerja, yang selanjutnya ditetapkan dalam dua dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan merupakan target kinerja Balai yang harus diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2024.

Pengukuran capaian kinerja BPPP Ambon tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *logical framework* dari Kementerian

Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPPP Ambon di tingkat korporat tahun 2024 sebesar 108,30%.



Dashboard Kinerja BPPP Ambon

Selama tahun 2024, dari 26 IKU yang menjadi target tahun 2024 BPPP Ambon, semua telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Capaian Kinerja BPPP Ambon Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (%)	72	75,02	104,19
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	2.902	3.028	104,34
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	0,682	3,091	120,00
		4	Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village/SFV) BPPP Ambon yang menerapkan IPTEK KP (Desa)	1	1	100,00
		5	Kawasan yang mengoptimalkan aset BPPP Ambon untuk Percontohan Pelatihan KP (Kawasan)	2	2	100,00
		6	Tenaga kerja yang terlibat Bidang Pelatihan Satker BPPP Ambon (Orang)	4	9	120,00
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	7	SDM KP Yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (Orang)	150	150	100,00
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	8	Lulusan pelatihan yang membentuk <i>start up</i> (usaha rintisan) di BPPP Ambon (Orang)	18	21	116,67
4	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	9	Jumlah Peyuluh Perikanan PNS yang mengikuti Uji Kompetensi Satker BPPP Ambon (Orang)	2	3	120,00
		10	Kelompok Pelaku utama/Pelaku Usaha KP yang disuluh di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	3.000	3.175	105,83
		11	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	90	98	108,89
		12	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang dibentuk di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	240	266	110,83
		13	Tenaga kerja yang terlibat Bidang Penyuluhan Satker BPPP Ambon (Orang)	370	430	116,22
		14	Fasilitasi Kelompok Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	5	10	120,00
5	Tersedianya Sarana dan Prasarana	15	Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	1	1	100,00

	Pelatihan dan Penyuluhan KP	16	Prasarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	1	1	100,00
6	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Ambon	17	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	100	100	100,00
		18	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Ambon (Nilai)	94	98,15	104,41
		19	Persentase unit kerja BPPP Ambon yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94	133,33	120,00
		20	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	81	84,11	103,84
		21	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-R atas LK BPPP Ambon (%)	≤ 0,5	0	120,00
		22	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	82	100	120,00
		23	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja BPPP Ambon (Inovasi)	1	1	100,00
		24	Penilaian Mandiri SAKIP Satker BPPP Ambon (Nilai)	78	82,55	105,83
		25	Nilai IKPA BPPP Ambon (nilai)	93,76	97,49	103,98
		26	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	71	100	120,00

Keterangan : Nilai capaian maksimal 120%

Secara umum kinerja BPPP Ambon sangat baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap IKU dengan Target Kinerja Tahunan yang merupakan Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan, tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan. Penanggung jawab IKU agar memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders BPPP Ambon. Laporan

ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BPPP Ambon. Akhirnya, BPPP Ambon berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan keempat sekaligus periode terakhir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJPN menjadi sarana memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

periode pembangunan tahap ke 4 (2020-2024) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Hal ini ditegaskan dalam misi ketujuh pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dengan basis kepentingan Nasional. Visi tersebut selaras dengan salah satu sasaran pokok RPJPN 2005-2025, yaitu "Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional". RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan

menengah atas (*upper-middle income country/ MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Perkembangan IPTEK yang pesat di era revolusi industri 4.0 dan era sosial (*society*) 5.0 menuntut adanya perubahan tatanan kehidupan baru yang berpusat pada manusia (*human-centered*) serta berbasis teknologi (*technology based*). *Cyber-physical system* (CPS) dalam Industri 4.0 merupakan integrasi antara *physical system*, komputasi dan juga *network* / komunikasi, sedangkan *society* 5.0 merupakan penyempurnaan dari CPS menjadi *cyber-physical-human systems*. Pada era *society* 5.0 manusia tidak hanya dijadikan obyek (*passive element*), tetapi berperan aktif sebagai subyek (*active player*) yang bekerja bersama *physical system* dalam mencapai tujuan. Berdasarkan hal tersebut, interaksi antara mesin (*physical system*) dan manusia diperlukan untuk menjaga keseimbangan maupun keharmonisan.

Hal utama yang harus dicermati adalah bahwa keberhasilan pembangunan perikanan sangat tergantung pada perubahan perilaku pelaku utama dalam menyikapi tantangan tersebut. Selain peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas, penyuluhan perikanan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan perikanan, karena mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan proses alih informasi dan teknologi (*transfer knowledge*) bagi pelaku utama beserta keluarganya serta anggota masyarakat lainnya. Terlebih lagi, pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Y Sub Urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dimana penyelenggaraan penyuluhan perikanan menjadi kewenangan pusat, sehingga BPPSDM melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP

dan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan sebagai unit satuan kerja harus mampu memainkan peran strategisnya agar penyelenggaraan penyuluhan perikanan dapat berjalan efektif, efisien dan kompeten.

Keberadaan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon memiliki peran yang strategis dalam mendukung visi dan misi KKP melalui:

- a. Peningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan secara optimal melalui pelatihan dan sertifikasi;
- b. Mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar dan peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- c. Membantu dalam meningkatkan ekonomi para pelaku usaha melalui penumbuhan dan pembentukan usaha mikro, kecil dan koperasi sektor kelautan dan perikanan; serta
- d. Meningkatkan pengelolaan alih teknologi bidang kelautan dan perikanan secara efektif dan efisien dan tepat sasaran melalui diseminasi dan pelatihan.

Untuk memastikan keseluruhan program dan kegiatan pembangunan KP tersebut dapat terlaksana sesuai dengan rencana target waktu, kuantitas, kualitas dan sasarannya, telah disepakati perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Menteri dengan Eselon I dan diturunkan secara berjenjang sampai tingkat individu pegawai, dan telah ditetapkan sampai tingkat daerah (satuan kerja).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

Salah satu prinsip dalam tata cara kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode pengukuran. Penyelenggaraan kegiatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan Negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu Instansi Pemerintah atas pelaksanaan program atau kegiatan yang dibiayai APBN/ APBD. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan *Good Governance* di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon pada tahun 2024 melaksanakan program kerja dan anggaran Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) PUSLAT KP dan PUSLUH KP. Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan program-program jangka panjang dan

menengah KKP khususnya program pelatihan dan penyuluhan KP sebagaimana tertuang dalam Renstra PUSLAT KP dan PUSLUH KP tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Tahun 2024 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon pada dasarnya adalah bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP dan kewenangan dalam menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang disertai dengan pemberdayaan sumberdaya dalam pencapaian visi organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, lingkup penyusunan laporan kinerja ini adalah memberikan gambaran kondisi objektif atau profil Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon untuk tahun 2024, perencanaan strategis, target dan capaian kinerja serta evaluasi capaian kinerja berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Utama dan/atau Penetapan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

1.2 Tujuan

Penyusunan Penyusunan laporan Kinerja (LKj) BPPP Ambon Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, dan memenuhi beberapa tujuan, yaitu:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan dan Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan selaku Pemberi Mandat atas pencapaian Kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon selama Tahun 2024.

- b. Sebagai umpan balik dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

1.3 Tugas dan Fungsi BPPP Ambon

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang pelatihan dan penyuluhan yang ada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPP Ambon dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan dibidang pelatihan dan penyuluhan perikanan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan pelatihan dan penyuluhan;
- c. Pelatihan teknis dan manajerial dibidang perikanan;
- d. Penyusunan materi, metodologi dan pelaksanaan penyuluhan perikanan;
- e. Pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis dan manajerial dibidang perikanan;
- f. Pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan;
- g. Pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta; dan
- i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, BPPP Ambon membentuk Struktur Organisasi dan didukung dengan kemampuan sumberdaya manusia perikanan dan sarana prasarana atau fasilitas yang tersedia. Masing-masing bagian mempunyai tugas pokok dan uraian tugas tersendiri. Sub Bagian Umum dengan tugasnya melakukan penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan, serta pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan perikanan. Kelompok jabatan fungsional dengan tugasnya memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.87/KEPMEN- KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon, Struktur Organisasi di BPPP Ambon dapat dilihat pada Gambar:



Gambar 1. Struktur Organisasi BPPP Ambon

1.4 Keragaan SDM BPPP Ambon

Jumlah pegawai di BPPP Ambon per 31 Desember 2024 sebanyak 410 orang dengan rincian komposisi pegawai sebagai berikut :

Tabel 1. Komposisi Pegawai BPPP Ambon

NO	BAGIAN	JUMLAH
1	Kepala Balai / Eselon III	1 Orang
2	Subbag Umum	0 Orang
	Jabatan Fungsional Umum	20 Orang
	Tenaga Kontrak	26 Orang
3	Jabatan Fungsional Tertentu	
	- Widyaiswara	3 Orang
	- Instruktur	14 Orang
	- Penyuluh	239 Orang
4	Jabatan Fungsional Lainnya	
	- Analis Perencana	1 Orang
	- Analis Kepegawaian	1 Orang
	- Pranata Keuangan APBN Mahir	1 Orang
	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	17 Orang
5	Penyuluh Perikanan Bantu	86 Orang
	Jumlah Total	410 Orang

1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja (LKj) BPPP Ambon Tahun 2024:

- a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. PP Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara lebih rinci, muatan dokumen LKj ini tergambar dalam sistematika laporan yang tersusun sebagai berikut :

- a. Ikhtisar Eksekutif, menyajikan ringkasan isi laporan kinerja;
- b. Bab I – Pendahuluan, Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
- c. Bab II – Perencanaan Kinerja, Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023.

- d. Bab III –Akuntabilitas Kinerja, Capaian Kinerja Organisasi, Menguraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
Realisasi Anggaran
Menguraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.
- e. Bab IV – Penutup, Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- f. Lampiran, Perjanjian kinerja,
Lampiran yang dianggap perlu.

1.6 Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) dibidang kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan kelautan dan perikanan. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta riset kelautan dan perikanan yang diarahkan untuk mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon bertugas melaksanakan kegiatan Pelatihan Kelautan dan Perikanan pada wilayah kerjanya di 9 (sembilan) Provinsi di Indonesia. Wilayah kerja BPPP Ambon yaitu Provinsi Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Papua

Barat Daya, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan. Kegiatan Pelatihan ditujukan kepada masyarakat kelautan dan perikanan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha di sektor penangkapan, budidaya, pengolahan, pemasaran hasil perikanan, serta masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.



Gambar 2. Wilayah Kerja BPPP Ambon

BPPP Ambon juga membawahi Penyuluh Perikanan pada 8 (delapan) Provinsi meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan. BPPP Ambon bertugas menyiapkan bahan pengembangan penyuluhan dan pelaksanaan penyuluhan, serta penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta.

SATMINKAL BPPP AMBON



Gambar 3. Wilayah Satminkal Penyuluhan BPPP Ambon

Keberhasilan pencapaian target ditentukan oleh sumberdaya yang dimiliki oleh suatu organisasi. Berikut adalah potensi sumberdaya BPPP Ambon dalam mencapai tujuan organisasi :

- 1) BPPP Ambon berada pada posisi yang sangat strategis di Kota Ambon, tepatnya di Jl. Martha Alfons, Poka, Kecamatan Teluk Ambon. Sebelah selatan berbatasan dengan Pantai Teluk Ambon, sebelah Utara berbatasan dengan Universitas Pattimura, sebelah barat dicapai dengan jalur darat melalui Wayame dan Rumah Tiga, Sebelah Timur dicapai dengan kapal feri penyebarangan Galala-Poka
- 2) Memiliki *workshop* yang lengkap untuk setiap bidang pelatihan;
- 3) BPPP Ambon memiliki instalasi budidaya ikan air tawar yang strategis untuk pengembangan budidaya ikan air tawar;
- 4) Memiliki SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidangnya (3 orang widyaiswara, 14 orang instruktur, 3 orang tenaga teknis/pelatih,

242 orang penyuluh perikanan PNS dan 17 orang PPPK Penyuluh Perikanan serta 89 orang penyuluh perikanan bantu);

- 5) Sebagian besar SDM BPPP Ambon memiliki usia muda yang produktif;
- 6) BPPP Ambon tersertifikasi ISO 9001:2015;
- 7) Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan diklat sesuai manajemen mutu ;
- 8) Memiliki akreditasi dari Direktorat Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan untuk menyelenggarakan diklat *Basic Safety Training* (BST);
- 9) Memiliki akreditasi program pelatihan budidaya ikan hias nemo dan pembesaran ikan kerapu pada KJA dari Lembaga Akreditasi (LA) Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
- 10) Adanya mandat dari Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan kepada BPPP Ambon sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK);
- 11) BPPP Ambon sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi 1 sehingga dapat menerbitkan sertifikat kompetensi sendiri;
- 12) SDM Asesor BPPP Ambon sebanyak 21 orang sehingga akan mampu melaksanakan uji kompetensi dengan jumlah peserta yang banyak;
- 13) BPPP Ambon mampu membuat sarana produksi perikanan tertentu;
- 14) BPPP Ambon mampu menghasilkan produk hasil perikanan yang layak dipasarkan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Langkah-langkah strategis jangka menengah yang akan memberikan arah bagi pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ini dituangkan dalam perencanaan strategis periode lima tahunan. Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada dokumen Renstra tersebut, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kegiatan yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis baik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun maupun 5 (lima) tahunan. Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam dokumen perencanaan kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon memuat rencana pelaksanaan program dan kegiatan termasuk dukungan pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan. Rencana kerja juga memuat target dan indikator sasaran yang diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Rencana strategis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2020-2024 berisi langkah-langkah strategis yang akan memberi arah bagi penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan penyuluhan dalam rangka menunjang visi Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan

masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan.

Sesuai dengan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dan untuk mencapai visi yang tertuang dalam RENSTRA, maka BPPP Ambon telah menetapkan Visi, Misi, Tugas dan Fungsi yaitu :

a. Visi

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi Presiden 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong". Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-2024 ditetapkan menggunakan visi Presiden.

Visi BPPSDM pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Visi Puslatluh KP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP dan visi BPPSDM yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Sejalan dengan Pusat pelatihan dan Penyuluhan KP, visi BPPP Ambon pada tahun 2020-2024 adalah menggunakan Visi BPPSDM, yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

b. Misi

Untuk dapat berkontribusi dalam pencapaian visi Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka BPPP Ambon menerapkan misi yang sama dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang menjalankan misi Presiden, KKP dan BPPSDM dalam bidang kelautan dan perikanan sebagai berikut:

- 1) Misi ke-1 yakni Peningkatan Kualitas SDM KP melalui Peningkatan kompetensi dan pendampingan dalam penerapan hasil inovasi riset Kelautan dan Perikanan;
- 2) Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui pelatihan dan penyuluhan KP guna mendukung peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
- 3) Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui pelatihan dan penyuluhan KP guna mendukung Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang lestari;
- 4) Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

c. Tujuan

Tujuan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi KKP yang ingin dicapai selama tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
- 2) Meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan.
- 3) Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing.
- 4) Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan menajerial SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.

d. Sasaran Kegiatan

Renstra BPPP Ambon tahun 2020 - 2024 menjelaskan bahwa sasaran kegiatan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan program pelatihan dan penyuluhan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh BPPP Ambon sebagai suatu *outcome/impact* dari program yang dilaksanakan,

dengan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam dua kegiatan, yaitu Kegiatan 1. Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan serta Kegiatan 2. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPP Ambon.

- 1) Terlaksananya pendampingan kelompok pelaku usaha/utama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP.

Mewujudkan masyarakat perikanan yang sejahtera melalui pendampingan kelompok oleh penyuluh perikanan adalah tujuan yang ingin dicapai BPPP Ambon pada masa kerja 5 tahun mendatang. Keberhasilan pencapaian tujuan ini ditandai dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- a) Tersuluhnya kelompok pelaku utama/usaha sebanyak 13.727 kelompok selama 2020-2024;
 - b) Kelompok yang dinilai kelas kelompoknya sebanyak 275 kelompok selama 2020- 2024;
 - c) Calon kelompok pelaku utama yang disiapkan untuk ditumbuhkan menjadi kelompok pelaku utama perikanan sebanyak 745 kelompok selama 2020-2024.
- 2) Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat.

Meningkatnya kompetensi SDM KP adalah tujuan utama pelatihan dan penyuluhan perikanan yang dilakukan oleh BPPP Ambon. Untuk mengetahui pencapaian tujuan itu, indikator yang digunakan selama 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

- a) Persentase Lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap di

Dunia Usaha dan Dunia Industri sebanyak 72 %.

- b) Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) sebanyak 56 orang.
- c) SDM KP yang dilatih sebanyak 12.015 orang.
- d) Percontohan penyuluhan KP yang diterapkan sebanyak 6 unit.
- e) Sarana BPPP Ambon yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 5 unit.
- f) Prasarana BPPP Ambon yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 4 unit.

3) Tatakelola pemerintahan yang baik

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon ingin menjadi instansi yang memiliki kinerja yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Untuk itu, tujuan ini adalah mutlak untuk menyempurnakan kekurangan yang dimiliki dengan indikator keberhasilan sebagai berikut :

- a) Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPP Ambon sebesar 81.
- b) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BPPP Ambon sebesar 94%.
- c) Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon adalah 93,76 atau baik.
- d) Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK tahun lalu dibandingkan realisasi anggaran TA. lalu sebesar $\leq 0,5$ %.
- e) Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon sebesar minimal 82.

e. Permasalahan

Sebagai Lembaga pelatihan dan penyuluhan yang terus berkembang menjadi pilihan utama stakeholder dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan, BPPP Ambon memiliki beberapa hal yang penting untuk diperbaiki antara lain :

Aspek penyelenggaraan pelatihan KP :

- 1) Ketersediaan tenaga pelatih (instruktur dan widyaiswara) yang terus berkurang dikarenakan beberapa sudah memasuki usia purnatugas dan mutasi;
- 2) Sarana dan prasarana pelatihan belum sesuai dengan standar minimal pelatihan yang ditetapkan dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini;
- 3) Kurikulum dan modul belum seluruhnya tersedia dan terstandarisasi.
- 4) Kurangnya program pengembangan SDM pelatih.

Sedangkan aspek penyelenggaraan penyuluhan :

- 1) Kelembagaan penyuluhan perikanan belum berjalan dengan optimal;
- 2) Kualitas dan kuantitas penyebaran penyuluh perikanan masih belum memadai;
- 3) Kuantitas dan kualitas materi penyuluhan perikanan masih terbatas dalam aksesibilitasnya;
- 4) Sarpras penyuluhan belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan tugas penyuluh;
- 5) Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan masih terbatas;
- 6) Legislasi dan regulasi belum seluruhnya tersedia;

- 7) Batasan peran pemerintah daerah belum jelas, terutama terkait penyelenggaraan penyuluhan pasca UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

2.2 Rencana Kerja Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pada Rencana Strategis, BPPP Ambon didukung dengan anggaran sebesar Rp 67.167.543.000. Dukungan anggaran tersebut berupa kegiatan :

Tabel 2. Dukungan anggaran BPPP Ambon

NO.	KEGIATAN	PAGU AWAL
	PROGRAM RISET SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	67.167.543.000
1	2375.DCC Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan (Base Line)	90.000.000
2	2375. QDD.001 Kelompok pelaku utama/usaha yang mendapat pendampingan dan penyuluhan KP	6.071.340.000
3	2375. QDD.002 Masyarakat KP yang mendapatkan percontohan perikanan	2.145.000.000
4	2375. RAL Sarana Bidang kemaritiman, kelautan dan perikanan (Base Line)	596.892.000
5	2375. RBQ Prasarana bidang kemaritiman, kelautan dan perikanan (Base Line)	150.000.000
6	2375. SCC Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan (Base Line)	5.553.448.000
7	2378. Layanan Dukungan Manajemen	460.311.000
8	001 Gaji dan Tunjangan	45.562.340.000
9	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	6.538.212.000

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PANRB Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja sendiri pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang diimplementasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah memiliki tujuan :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelesaikan manajemen kinerja secara baik,
- b. Untuk mengontrol serta mengevaluasi tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan kinerja didalam laporan kinerja ini sudah didasarkan pada analisis *logical framework*. Penetapan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2024 disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Januari 2024. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024.

Sampai pada akhir Tahun 2024, BPPP Ambon telah mengalami perubahan Perjanjian Kinerja BPPP Ambon sebanyak 2 kali, yaitu :

1. Pada bulan April 2024, terjadi pemisahan 1 lembaga eselon II yaitu Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan menjadi 2 lembaga eselon II yaitu Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan dan Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sehingga membuat BPPP Ambon memiliki 2 perjanjian kinerja antara 2 lembaga eselon II tersebut.
2. Pada bulan November 2024, terjadi perubahan pemotongan anggaran pada operasional perkantoran dan alokasi blokir anggaran pelatihan dan penyuluhan sehingga terjadi penurunan target pelatihan dan penyuluhan.

Tabel 3. Penggabungan Perjanjian Kinerja antara Pusat Pelatihan KP dan Pusat Penyuluhan KP tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (%)	72
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	2.902
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	0,682
		4	Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village/SFV) BPPP Ambon yang menerapkan IPTEK KP (Desa)	1
		5	Kawasan yang mengoptimalkan aset BPPP Ambon untuk Percontohan Pelatihan KP (Kawasan)	2
		6	Tenaga kerja yang terlibat Bidang Pelatihan Satker BPPP Ambon (Orang)	4
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	7	SDM KP Yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (Orang)	150
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	8	Lulusan pelatihan yang membentuk <i>start up</i> (usaha rintisan) di BPPP Ambon (Orang)	18
4	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	9	Jumlah Peyuluh Perikanan PNS yang mengikuti Uji Kompetensi Satker BPPP Ambon (Orang)	2
		10	Kelompok Pelaku utama/Pelaku Usaha KP yang disuluh di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	3.000
		11	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	90
		12	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang dibentuk di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	240
		13	Tenaga kerja yang terlibat Bidang Penyuluhan Satker BPPP Ambon (Orang)	370
		14	Fasilitasi Kelompok Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	5
5	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP	15	Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	1
		16	Prasarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	1
6	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Ambon	17	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	100
		18	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Ambon (Nilai)	94
		19	Persentase unit kerja BPPP Ambon yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94
		20	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	81
		21	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-R atas LK BPPP Ambon (%)	≤ 0,5
		22	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	82
		23	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja BPPP Ambon (Inovasi)	1

	24	Penilaian Mandiri SAKIP Satker BPPP Ambon (Nilai)	78
	25	Nilai IKPA BPPP Ambon (nilai)	93,76
	26	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	71

Keterangan :

	IKU dengan Pusat Pelatihan KP
	IKU dengan Pusat Penyuluhan KP

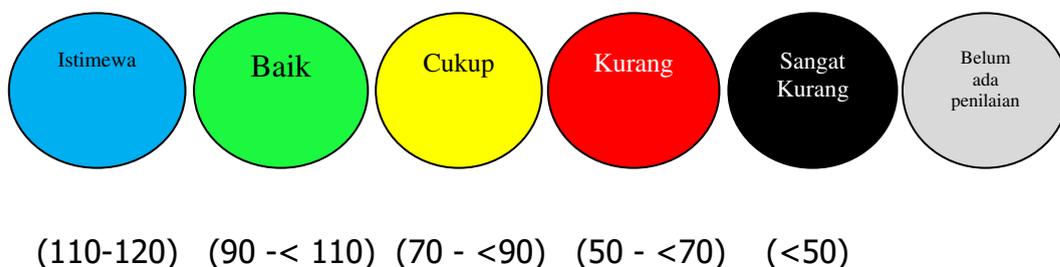
2.4 Pengukuran Kinerja

2.4.01 Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BPPP Ambon Tahun 2024, dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

- a. Angka maksimum adalah 120;
- b. Angka minimum adalah 0;
- c. Formulasi penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda.

Adapun status indeks capaian IKU seperti gambar sebagai berikut :



Gambar 4. Status indeks capaian IKU

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing- masing Indikator yang ada dalam dokumen *logical framework*.

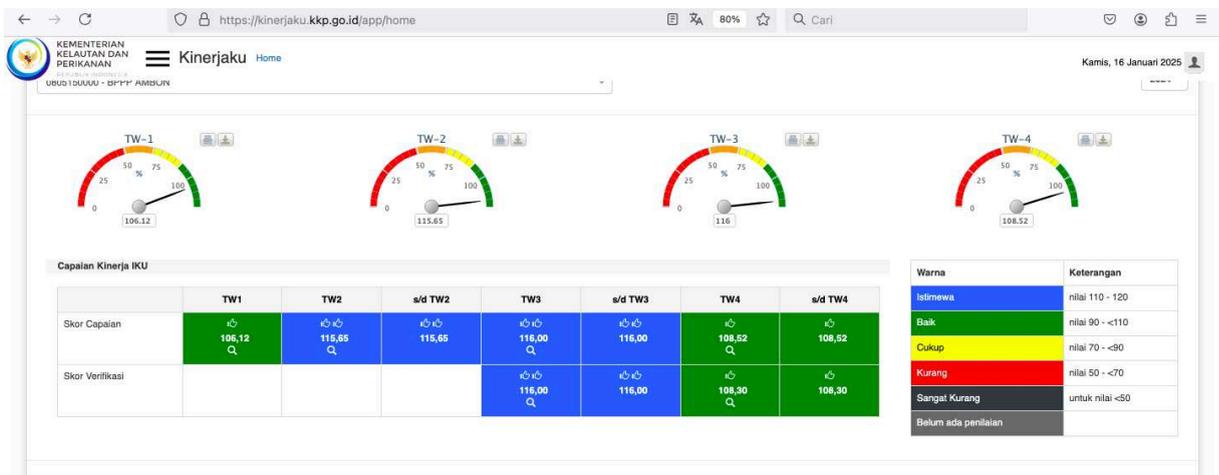
2.4.02 Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja lingkup BPPP Ambon dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12), serta tahunan pada akhir tahun anggaran. Pengukuran ditugaskan kepada Tim Pengelola Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BPPP Ambon Nomor 19/BPPP.AMB/OT.210/I/2023 tentang Tim Penyusunan laporan Kinerja BPPP Ambon Tahun 2022 dan Triwulanan Tahun 2024. Keanggotaan tim terdiri dari pejabat dan staf yang mewakili semua bagian lingkup BPPP Ambon. Berdasarkan laporan bagian penanggung jawab kegiatan, Kepala Balai c.q. Bagian Program, Monitoring dan Evaluasi merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Prestasi Kinerja

Pengukuran capaian kinerja BPPP Ambon triwulan III tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*Key Performance Indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *logical framework* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPPP Ambon tahun 2024 sebesar 108,30%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 5. Dashboard Kinerjaku Level 3 BPPP Ambon

Selama tahun 2024, dari 26 IKU yang menjadi tahun 2024 BPPP Ambon, semua telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPPSDM KP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran kegiatan dan tujuan kegiatan dapat tercapai. BPPP Ambon pada tahun 2024 memiliki beberapa kegiatan prioritas dengan capaian kinerja atas kegiatan prioritas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Capaian IKU BPPP Ambon tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (%)	72	75,02	104,19
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	2.902	3.028	104,34
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	0,682	3,091	120,00
		4	Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village/SFV) BPPP Ambon yang menerapkan IPTEK KP (Desa)	1	1	100,00
		5	Kawasan yang mengoptimalkan aset BPPP Ambon untuk Percontohan Pelatihan KP (Kawasan)	2	2	100,00
		6	Tenaga kerja yang terlibat Bidang Pelatihan Satker BPPP Ambon (Orang)	4	9	120,00
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	7	SDM KP Yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (Orang)	150	150	100,00
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	8	Lulusan pelatihan yang membentuk <i>start up</i> (usaha rintisan) di BPPP Ambon (Orang)	18	21	116,67
4	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	9	Jumlah Peyuluh Perikanan PNS yang mengikuti Uji Kompetensi Satker BPPP Ambon (Orang)	2	3	120,00
		10	Kelompok Pelaku utama/Pelaku Usaha KP yang disuluh di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	3.000	3.175	105,83

		11	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	90	98	108,89
		12	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang dibentuk di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	240	266	110,83
		13	Tenaga kerja yang terlibat Bidang Penyuluhan Satker BPPP Ambon (Orang)	370	430	116,22
		14	Fasilitasi Kelompok Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	5	10	120,00
5	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP	15	Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	1	1	100,00
		16	Prasarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	1	1	100,00
6	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Ambon	17	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	100	100	100,00
		18	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Ambon (Nilai)	94	98,15	104,41
		19	Persentase unit kerja BPPP Ambon yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94	133,33	120,00
		20	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	81	84,11	103,84
		21	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-R atas LK BPPP Ambon (%)	≤ 0,5	0	120,00
		22	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	82	100	120,00
		23	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja BPPP Ambon (Inovasi)	1	1	100,00
		24	Penilaian Mandiri SAKIP Satker BPPP Ambon (Nilai)	78	82,55	105,83
		25	Nilai IKPA BPPP Ambon (nilai)	93,76	97,49	103,98
		26	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	71	100	120,00

Keterangan : Nilai capaian maksimal 120%

Salah satu misi BPPSDM KP dalam mendukung visi Kementerian adalah peningkatan kualitas SDM KP melalui peningkatan kompetensi dan pendampingan dalam penerapan hasil inovasi riset Kelautan dan Perikanan. Dengan fokus kesejahteraan masyarakat dengan didukung oleh pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan maka sasaran strategis tersebut menjadi tujuan utama pencapaian Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon dengan didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja utama atas sasaran strategis tersebut. BPPP Ambon sebagai bagian dari pembangunan kelautan dan perikanan melalui peningkatan kompetensi dan pendampingan bertanggung jawab sesuai tugas

dan fungsi atas pencapaian sasaran strategis tersebut dengan dukungan alokasi anggaran pada setiap IKU sasaran strategis tersebut melalui peningkatan kompetensi dan pendampingan dengan sentuhan kegiatan penyuluhan KP.

Kegiatan 1. Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Sasaran Kegiatan 1

Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan

Untuk mencapai sasaran kegiatan terselenggaranya pelatihan SDM kelautan dan perikanan terdapat 6 indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 1: Persentase Lulusan Pelatihan Yang Terserap Di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (%), IKU 2 : Masyarakat Kelautan dan Perikanan Yang Dilatih di BPPP Ambon (Orang), IKU 3 : Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar), IKU 4 : Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village/SFV) BPPP Ambon yang menerapkan IPTEK KP (Kawasan), IKU 5 : Kawasan yang mengoptimalkan aset BPPP Ambon untuk Percontohan Pelatihan KP (Kawasan) dan IKU 6 : Tenaga kerja yang terlibat Satker BPPP Ambon (Orang).

Indikator Kinerja 1

Persentase lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri BPPP Ambon (%)

IKU ini merupakan Persentase lulusan pelatihan merupakan indikator yang menunjukkan Jumlah lulusan pelatihan pelaku utama/usaha yang menerapkan hasil pelatihan (meningkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang bekerja di dunia usaha dunia industri (DUDI) dibandingkan dengan jumlah total target pelatihan

masyarakat yang diselenggarakan oleh BPPP Ambon Tahun 2024 dengan formula perhitungan lulusan pelatihan yang bekerja di DUDI dibagi total target pelatihan. Capaian Persentase lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri BPPP Ambon Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

IKU 1-Persentase lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri BPPP Ambon (%)									
Realisasi				Tahun 2024				Renstra BPPP Ambon 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
61,63	61,74	66,92	72,3	72	75,02	104,19	3,76	72	104,19

Capaian indikator ini telah mencapai 75,02 % dari target yaitu 72 %. Jika dibandingkan dengan Capaian indikator dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar 3,76%. Terhadap target Renstra tahun 2024, capaian tahun 2024 sebesar 104,19%.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Perbandingan realisasi persentase lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri BPPP Ambon dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	72	75	104,17
2	BPPP Banyuwangi	72	76,91	106,82
3	BPPP Bitung	72	75,06	104,25
4	BPPP Ambon	72	75,02	104,19
5	BPPP Medan	72	75,03	104,21

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini pada akhir tahun adalah:

- a) terdapatnya instrument evaluasi pasca pelatihan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya setelah 1 siklus produksi setelah dilatih, sebagai bahan capaian lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri BPPP Ambon.
- b) Terdapat SOP kegiatan evaluasi pasca pelatihan sebagai SOP utama BPPP Ambon.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

- a) Efisiensi biaya perjalanan petugas evaluasi pasca pelatihan secara langsung dengan mengoptimalkan peran penyuluh dilapangan.
- b) Kemudahan petugas evaluasi pasca pelatihan dalam merekap hasil evaluasi pasca pelatihan dikarenakan hasil yang dikirm sudah dalam bentuk softcopy sesuai dengan format yang ditetapkan.

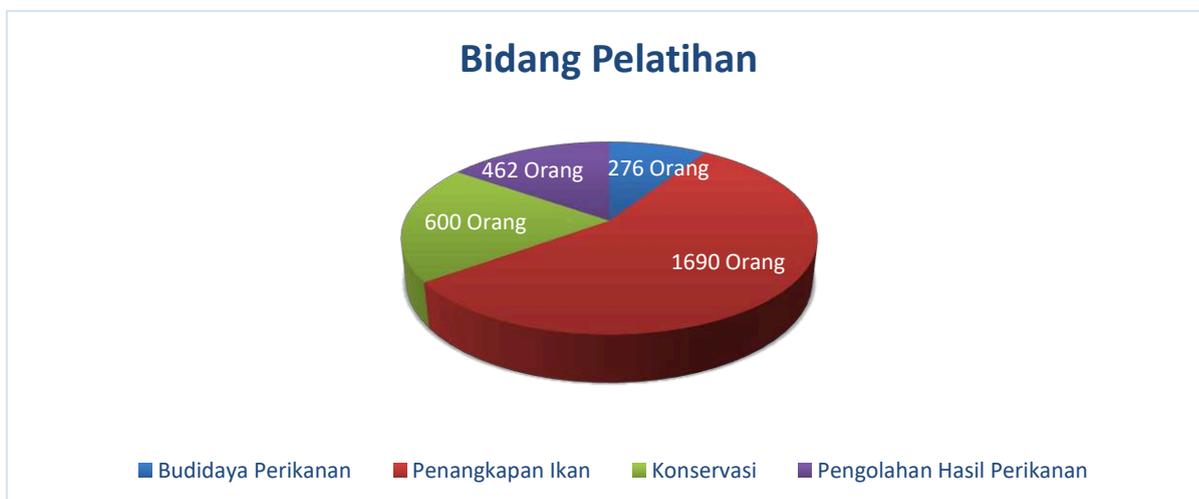
Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2024, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Optimalisasi peran penyuluh perikanan dalam membantu melakukan evaluasi pasca pelatihan yang tidak bisa dilakukan oleh petugas evaluasi pasca pelatihan
2. Melakukan analisis terhadap hasil pelaksanaan pelatihan menggunakan instrumen evaluasi pasca pelatihan sebagai bahan masukan untuk perbaikan penyelenggaraan pelatihan berikutnya.
3. Pelaksanaan pendampingan oleh Penyuluh perikanan dalam mengidentifikasi dan melakukan pengisian instrumen evaluasi pasca pelatihan dan pendampingan penerapan hasil pelatihan.

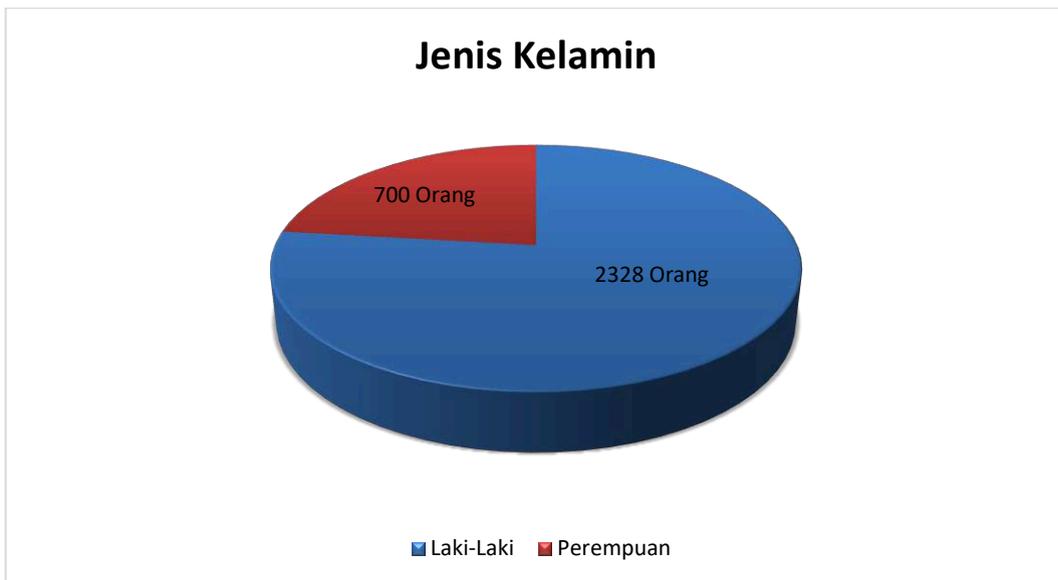
Indikator Kinerja 2

Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (orang).

IKU ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Masyarakat KP yang telah dilatih dengan kriteria : Pelatihan berbasis APBN, peserta merupakan masyarakat (non ASN), penyelenggaraan pelatihan regular (full tatap muka) dan pelatihan *full online*, dan peserta hanya satu kali mengikuti pelatihan di tahun yang sama, kecuali pelatihan dengan level kompetensi lebih tinggi dengan formula perhitungan Akumulasi jumlah masyarakat KP yang telah mengikuti pelatihan sesuai kriteria pelatihan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih sampai dengan tahun 2024 perbidang kompetensi dan jenis pelatihan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 6. Jumlah masyarakat yang dilatih berdasarkan bidang kompetensi



Gambar 7. Jumlah masyarakat yang dilatih berdasarkan jenis pelatihan

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih dapat dilihat pada tabel :

Tabel 7. Capaian Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih di BPPP Ambon

IKU 2-Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)									
Realisasi				Tahun 2024				Renstra BPPP Ambon 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
1165	1393	2857	2560	2392	2540	104,34	-14,34	5.000	60,56



Gambar 8. Pelatihan Basic Safety Training

Gambar 9. Pelatihan SKN di Kab. Merauke



Gambar 10. Pelatihan Ecobrick Kolam Ikan Hias di Kab. Merauke



Gambar 11. Pelatihan Olahan Produk Perikanan di Kab. Merauke





Gambar 12. Pelatihan SKN di Kab. Seram Bagian Barat

Capaian indikator ini telah mencapai 3.028 orang dari target yaitu 2.902 orang. Jika dibandingkan dengan Capaian indikator dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar 104,34%. Terhadap target Renstra tahun 2024, capaian tahun 2024 sebesar 60,56%.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Perbandingan realisasi Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	19800	23321	117,78
2	BPPP Banyuwangi	7915	8371	105,76
3	BPPP Bitung	2901	2936	101,21
4	BPPP Ambon	2902	3028	104,34
5	BPPP Medan	3787	3945	104,17

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah:

- a) Adanya SOP kegiatan pelatihan yang merupakan SOP utama BPPP Ambon
- b) Kalender pelatihan blanded telah disampaikan kepada Anggota Komisi IV DPR RI

sebagai komitmen kegiatan penyelenggaraan pelatihan yang harus dilaksanakan

- c) Adanya aplikasi SiPintar BPPP Ambon mempermudah dan mempersingkat waktu Identifikasi kebutuhan pelatihan dan pendaftaran pelatihan secara online

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Efisiensi biaya koordinasi persiapan pelatihan menggunakan media Whatshapp
2. Persiapan kegiatan pelatihan yang dilakukan secara intensif oleh panitia pelatihan dan penyuluh pendamping sehingga proses kegiatan pelatihan dapat berjalan dengan lancar sampai akhir kegiatan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2024, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Membuat kalender pelatihan KP sesuai arahan kebijakan pimpinan, kebutuhan daerah dan potensi daerah
2. Bekerjasama dengan Penyuluh pendamping rencana kegiatan pelatihan yang akan diselenggarakan baik secara *zoom meeting* maupun komunikasi secara intensif melalui telepon.

Indikator Kinerja 3

Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar).

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan

hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan dengan perhitungan dilakukan setiap triwulan.

Cara perhitungan IKU tersebut dengan menjumlahkan seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan yang tercatat pada aplikasi OM SPAM BPPP Ambon.

Sampai akhir Tahun 2024 BPPP Ambon telah memperoleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan berdasarkan surat dari Sekertaris BPPSDM KP Nomor B.224/BPPSDM.1/KU.340/I/2025 tentang capaian PNBP Satuan Kerja BPPSDM Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 3,091 Miliar.

Tabel 9. Capaian Nilai PNBP Satker BPPP Ambon

IKU 3-Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)									
Realisasi				Tahun 2024				Renstra BPPP Ambon 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
0	0	0,51	0,71	0,682	3,091	453,23 (120)	335,35	0,405	763,21

Capaian indikator ini telah mencapai 3,091 rupiah miliar dari target yaitu 0,682 rupiah miliar. Jika dibandingkan dengan Capaian indikator dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar 453,23%. Terhadap target Renstra tahun 2024, capaian tahun 2024 sebesar 763,21%.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10. Perbandingan realisasi Nilai PNBP Satker dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	13,94	19,99	120
2	BPPP Banyuwangi	0,77	1,65	120
3	BPPP Bitung	0,19	0,65	120
4	BPPP Ambon	0,682	3,091	120
5	BPPP Medan	0,38	0,69	120

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah

- a) Adanya aplikasi SiPintar BPPP Ambon mempermudah dan mempersingkat waktu pendaftaran pelatihan BST bersumber dari PNBP secara online
- b) Komitmen Pimpinan dan Tim Humas dalam melakukan Promosi baik secara langsung maupun pada media sosial BPPP Ambon kegiatan strategis sebagai sumber penghasil PNBP serta membangun jejaring kerjasama dengan stakeholder dalam segi peningkatan kapasitas SDM KP.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Penggunaan aplikasi SiPintar BPPP Ambon dalam melakukan pendaftaran pelatihan BST bersumber dari PNBP memudahkan peserta dalam menginput berkas tanpa harus datang langsung ke BPPP Ambon
2. Pemanfaatan aset barang milik negara yang dilaksanakan secara optimal
3. Promosi dengan menggunakan media sosial lebih meningkatkan ruang lingkup promosi bahkan sampai luar Provinsi Maluku, sehingga dapat mengefisiensi anggaran promosi dan petugas yang melakukan promosi tersebut.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada Tahun 2024, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Kegiatan pelatihan *Basic Safety Training* (BST) yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

2. Kegiatan kerjasama pelatihan yang menggunakan sarana dan prasarana BPPP Ambon yang sangat memadai.

Indikator Kinerja 4

Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisherie Village/SFV) BPPP Ambon yang menerapkan IPTEK KP (Kawasan)

Desa Perikanan Cerdas merupakan konsep pembangunan desa perikanan yang berbasis penerapan teknologi informasi komunikasi dan manajemen tepat guna berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa yang diwujudkan dalam kegiatan prioritas BPPSDM yaitu Desa Perikanan cerdas/Smart Fisheries village (SFV)

Sesuai dengan Keputusan Ka BRSDM No.38/2022, dengan dikembangkannya Desa Perikanan cerdas/*Smart Fisheries Village* (SFV) akan terbentuk desa perikanan unggulan yang produktif yang mampu menerapkan teknologi dan informasi, mandiri dan memperhatikan prinsip berkelanjutan

IKU ini merupakan IKU baru yang baru ada pada tahun 2020, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung jumlah Desa yang memanfaatkan teknologi dan inovasi kelautan dan perikanan tahun 2022 yang dibuktikan dengan MOU/PKS antara Kepala Badan RSDMKP dengan Bupati/Walikota.

Sampai akhir tahun 2024, BPPP Ambon sudah identifikasi lokasi desa/kawasan mitra yang menerapkan IPTEK di BPPP Ambon sebanyak 1 Desa yaitu Desa SumberBinyeri Kab. Biak Numfor.

Tabel 11. Capaian Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village/SFV) BPPP Ambon yang menerapkan IPTEK KP (Desa)

IKU 4-Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village/SFV) BPPP Ambon yang menerapkan IPTEK KP (Desa)									
Realisasi				Tahun 2024				Renstra BPPP Ambon 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
2	1	1	1	1	1	100	0	1	100

Capaian indikator ini telah mencapai 1 Desa dari target yaitu 1 Desa. Jika dibandingkan dengan Capaian indikator dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023, tidak terjadi peningkatan atau penurunan. Terhadap target Renstra tahun 2024, capaian tahun 2024 sebesar 100%.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12. Perbandingan realisasi Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village/SFV) BPPP Ambon yang menerapkan IPTEK KP (Desa) dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	2	2	100
2	BPPP Banyuwangi	1	1	100
3	BPPP Bitung	0	0	0
4	BPPP Ambon	1	1	100
5	BPPP Medan	1	1	100

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah:

1. Adanya keputusan kepala BPPSDM KP Nomor 240 Tahun 2024 tentang penetapan lokasi Desa Perikanan Cerdas/Smart Fisheries Village
2. Nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Ambon dengan BRSDM KP

no. 3/BRSDM/KKP/KB/II/2023-523/03/NK/2023 tentang sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan SDM KP di Desa Perikanan Cerdas/Smart Fisheries Village

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Lokasi desa perikanan cerdas merupakan desa binaan penyuluh perikanan BPPP Ambon sehingga memudahkan pemantauan progress kemajuan
2. Penyerapan anggaran tunjangan kinerja penyuluh PNS dan BOP PNS serta PPB dapat terealisasi secara optimal dengan disertai capaian kinerja yang telah ditetapkan kepada masing-masing penyuluh.
3. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun sehingga diharapkan seluruh target kinerja individu penyuluh yang tercasading langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2024, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Masing-masing penyuluh tetap melaksanakan pendampingan terhadap kelompok perikanan dan kelautan yang disuluh sesuai dengan wilayah binaannya.
2. Antusias masyarakat pelaku usaha KP untuk menjadi kelompok perikanan pada tahun 2024.

Indikator Kinerja 5

Kawasan yang mengoptimalkan aset BPPP Ambon untuk Percontohan Pelatihan KP (Kawasan)

Kawasan dalam suatu unit kerja atau instalasi di lingkup BPPSDM KP yang mengoptimalkan sumber daya berupa sarana dan prasarana termasuk SDM untuk mendukung pengembangan percontohan pelatihan guna mengembangkan konsep pembangunan desa perikanan yang berbasis penerapan teknologi informasi komunikasi dan manajemen tepat guna berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa yang diwujudkan dalam kegiatan prioritas BPPSDM yaitu Desa Perikanan cerdas/ *Smart Fisheries Village* (SFV).

Sesuai dengan Keputusan Ka BPPSDM, dengan dikembangkannya Desa Perikanan cerdas/ *Smart Fisheries Village* SFV berbasis UPT menghasilkan produk kelautan perikanan unggulan untuk Masyarakat yang produktif melalui penerapan teknologi dan informasi, mandiri serta berprinsip berkelanjutan,

IKU ini merupakan IKU baru yang baru ada pada tahun 2024, penghitungan dilakukan dengan cara menilai calon lokasi sesuai dengan kriteria Desa Perikanan cerdas/ *Smart Fisheries Village* SMART SFV oleh TAP dan Unit Kerja Pusat (tambahan Kawasan baru) serta Keputusan Ka. BPPSDM tentang Lokasi SFV (SFV UPT dan SFV Pendukung)

Sampai akhir tahun 2024, BPPP Ambon sudah mengidentifikasi Kawasan yang mengoptimalkan aset BPPP Ambon untuk percontohan Pelatihan KP (Kawasan) sebanyak 2 Kawasan yaitu Kawasan SFV Desa Poka dan Kawasan SFV UPT BPPP Ambon.

Tabel 13. Capaian Kawasan yang mengoptimalkan aset BPPP Ambon untuk percontohan Pelatihan KP (Kawasan)

IKU 4-Kawasan yang mengoptimalkan aset BPPP Ambon untuk percontohan pelatihan KP (Kawasan)									
Realisasi				Tahun 2024				Renstra BPPP Ambon 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
0	0	0	0	1	2	200 (120)	200	1	200

Capaian indikator ini telah mencapai 2 Kawasan dari target yaitu 1 Kawasan. Jika dibandingkan dengan Capaian indikator dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar 200%. Terhadap target Renstra tahun 2024, capaian tahun 2024 sebesar 200%.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14. Perbandingan realisasi Kawasan yang mengoptimalkan aset BPPP Ambon untuk percontohan Pelatihan KP (Kawasan) dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	3	3	100
2	BPPP Banyuwangi	4	4	100
3	BPPP Bitung	1	1	100
4	BPPP Ambon	1	2	120
5	BPPP Medan	1	1	100

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah:

1. Adanya keputusan kepala BPPSDM KP Nomor 240 Tahun 2024 tentang penetapan lokasi Desa Perikanan Cerdas/Smart Fisheries Village
2. Nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Ambon dengan BRSDM KP

no. 3/BRSDM/KKP/KB/II/2023-523/03/NK/2023 tentang sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan SDM KP di Desa Perikanan Cerdas/Smart Fisheries Village

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Lokasi desa perikanan cerdas berada disamping BPPP Ambon sehingga memudahkan pemantauan progress kemajuan
2. Penyerapan anggaran tunjangan kinerja penyuluh PNS dan BOP PNS serta PPB dapat terealisasi secara optimal dengan disertai capaian kinerja yang telah ditetapkan kepada masing-masing penyuluh.
3. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun sehingga diharapkan seluruh target kinerja individu penyuluh yang tercasading langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2024, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Masing-masing penyuluh tetap melaksanakan pendampingan terhadap kelompok perikanan dan kelautan yang disuluh sesuai dengan wilayah binaannya.
2. Antusias masyarakat pelaku usaha KP untuk menjadi kelompok perikanan pada tahun 2024.

Indikator Kinerja 6

Tenaga kerja yang terlibat Satker BPPP Ambon (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat/operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik di sektor kelautan dan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran produk perikanan, pengelolaan ruang laut, penyuluhan pelatihan serta karantina ikan. Tenaga kerja yang terlibat langsung di lingkup BPPSDM diantaranya : P2MKP, Tenaga Kerja Harian Lepas yang terlibat dalam kegiatan SFV dengan perhitungan dilakukan pada akhir tahun.

IKU ini merupakan IKU baru yang baru ada pada tahun 2024, penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan tenaga kerja yang terlibat bidang Pelatihan KP

Sampai akhir Tahun 2024, BPPP Ambon telah melakukan identifikasi tenaga kerja yang terlibat bidang pelatihan satker BPPP Ambon sebanyak 9 orang.

Tabel 15. Capaian Tenaga Kerja yang terlibat Bidang Pelatihan Satker BPPP Ambon (Orang)

IKU 4-Tenaga Kerja yang terlibat bidang Pelatihan Satker BPPP Ambon (Orang)									
Realisasi				Tahun 2024				Renstra BPPP Ambon 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
0	0	0	0	4	9	225 (120)	225	4	225

Capaian indikator ini telah mencapai 9 orang dari target yaitu 4 orang. Jika dibandingkan dengan Capaian indikator dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023,

terjadi peningkatan sebesar 225%. Terhadap target Renstra tahun 2024, capaian tahun 2024 sebesar 225%.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16. Perbandingan realisasi Tenaga Kerja yang terlibat bidang Pelatihan Satker BPPP Ambon dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	54	58	107,41
2	BPPP Banyuwangi	24	30	120
3	BPPP Bitung	16	21	120
4	BPPP Ambon	4	9	120
5	BPPP Medan	24	29	120

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini pada akhir tahun adalah tersedianya instrumen tenaga kerja yang terlibat dengan BPPP Ambon baik yang dilakukan oleh pengelola Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Efisiensi biaya perjalanan petugas identifikasi tenaga kerja yang terlibat dengan BPPP Ambon secara langsung sehingga dapat dialihkan untuk kegiatan strategis yang lain yang mendukung peningkatan kinerja BPPP Ambon.
2. Kemudahan petugas identifikasi tenaga kerja yang terlibat dengan BPPP Ambon dalam merekap hasil evaluasi pasca pelatihan dikarenakan hasil yang dikirim sudah dalam bentuk softcopy sesuai dengan format kuisisioner yang ditetapkan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2024, BPPP Ambon memiliki kegiatan strategis berupa Sosialisasi peranan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan dalam mengidentifikasi tenaga kerja yang terlibat dengan BPPP Ambon.

Sasaran Kegiatan 2

Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan

Untuk mencapai sasaran kegiatan terselenggaranya sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan terdapat 1 indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 7 : SDM KP Yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (Orang).

Indikator Kinerja 7

SDM KP Yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (Orang)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah SDM KP yang mengikuti uji kompetensi sesuai dengan persyaratan uji kompetensi. Peserta yang mendapatkan sertifikat kompetensi adalah yang sudah dinyatakan lulus sesuai dengan persyaratan dan ujian. Sertifikat dikeluarkan oleh LSP/BNSP dan atau Lembaga Sertifikasi lainnya.

IKU ini merupakan IKU baru yang ada pada tahun 2023, cara perhitungannya dengan menghitung jumlah SDM yang mengikuti sertifikasi kompetensi di wilayah kerja BPPP Ambon.

Sampai akhir Tahun 2024, BPPP Ambon telah melakukan ujikompetensi pelatihan dan peserta yang diuji mendapatkan sertifikat kompetensi sebanyak 150 orang.

Tabel 17. Capaian SDM KP Yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (Orang)

IKU 7-SDM KP Yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (Orang)									
Realisasi				Tahun 2024				Renstra BPPP Ambon 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
0	0	0	90	150	150	100	66,67	150	100

Capaian indikator ini telah mencapai 150 orang dari target yaitu 150 orang. Jika dibandingkan dengan Capaian indikator dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar 66,67%. Terhadap target Renstra tahun 2024, capaian tahun 2024 sebesar 100%.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 18. Perbandingan realisasi SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Ambon (Orang)

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	1000	1297	120
2	BPPP Banyuwangi	270	270	100
3	BPPP Bitung	150	150	100
4	BPPP Ambon	150	150	100
5	BPPP Medan	150	176	117,33

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini pada akhir tahun adalah

1. Resertifikasi LSP BPPP Ambon telah terbit pada tahun 2023 sehingga dapat melakukan uji kompetensi kembali kepada lulusan peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPP Ambon.
2. Jumlah asesor kompetensi BPPP Ambon yang masih memenuhi standar kegiatan

sertifikasi kompetensi baik bidang budidaya perikanan, pengolahan hasil perikanan, permesinan kapal, penangkapan ikan dan konservasi perikanan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Kelengkapan sarana dan prasarana sertifikasi kompetensi yang tersedia di BPPP Ambon.
2. Promosi dengan menggunakan media sosial lebih meningkatkan ruang lingkup promosi bahkan sampai luar Provinsi Maluku, sehingga dapat mengefisieni anggaran promosi dan petugas yang melakukan promosi tersebut.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada Tahun 2024, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. kegiatan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Kegiatan kerjasama sertifikasi kompetensi dengan sekolah-sekolah yang memutuhkan sertifikasi kompetensi bagi anak didiknya.

Sasaran Kegiatan 3

Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP

Untuk mencapai sasaran kegiatan terselenggaranya kaji terap pelatihan KP terdapat indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 8 : Lulusan Pelatihan Yang Membentuk *Start Up* (Usaha Rintisan) di BPPP Ambon (Orang)

Indikator Kinerja 8

Lulusan pelatihan yang membentuk *start up* (Usaha Rintisan) di BPPP Ambon (orang).

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah lulusan pelatihan yang melakukan wirausaha dengan memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan usahanya (pengembangan ekonomi digital) dan atau membuat jejaring pasar dengan perhitungan dilakukan pada akhir tahun.

IKU ini merupakan IKU baru yang baru ada pada tahun 2020, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung jumlah pelaku utama lulusan pelatihan yang melakukan wirausaha dan memanfaatkan teknologi digital dan atau jejaring pasar dalam pengembangan usahanya yang dihitung melalui evaluasi pasca pelatihan sekurang-kurangnya setelah 1 siklus periode setelah dilatih.

Sampai akhir Tahun 2024, BPPP Ambon telah melakukan identifikasi lulusan pelatihan yang akan membentuk start up sebanyak 21 orang.

Tabel 19. Capaian Lulusan pelatihan yang membentuk *start up* (usaha rintisan) di BPPP Ambon (Orang)

IKU 8-Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) di BPPP Ambon (Orang)									
Realisasi				Tahun 2024				Renstra BPPP Ambon 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
5	5	12	16	18	21	116,67	31,25	18	116,67

Capaian indikator ini telah mencapai 21 orang dari target yaitu 18 orang. Jika dibandingkan dengan Capaian indikator dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar 31,25%. Terhadap target Renstra tahun 2024, capaian tahun 2024 sebesar 116,67%.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 20. Perbandingan realisasi Lulusan pelatihan yang membentuk *start up* (usaha rintisan) di BPPP Ambon (Orang)

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	49	55	112,24
2	BPPP Banyuwangi	38	38	100
3	BPPP Bitung	18	27	120
4	BPPP Ambon	18	21	116,67
5	BPPP Medan	24	24	100

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini pada akhir tahun adalah adanya instrumen evaluasi pasca pelatihan oleh purnawidya yang nantinya akan menjadi output yang membentuk *start up* (usaha rintisan) yang mudah dipahami oleh purnawidya pelatihan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Efisiensi biaya perjalanan petugas evaluasi pasca pelatihan secara langsung sehingga dapat dialihkan untuk kegiatan strategis yang lain yang mendukung peningkatan kinerja BPPP Ambon.
2. Kemudahan petugas evaluasi pasca pelatihan dalam merekap hasil evaluasi pasca pelatihan dikarenakan hasil yang dikirm sudah dalam bentuk softcopy sesuai dengan format yang ditetapkan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2024, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Telah menyiapkan instrumen Evaluasi pasca pelatihan untuk identifikasi

purnawidya yang membentuk *start up* (usaha rintisan)

2. Bekerjasama dengan Penyuluh pendamping kegiatan pelatihan yang telah diselenggarakan dalam identifikasi dan pengisian instrumen Evaluasi pasca pelatihan.

Sasaran Kegiatan 4

Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Untuk mencapai sasaran kegiatan terselenggaranya penyuluhan kelautan dan perikanan terdapat 6 indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 9 : Jumlah Penyuluh Perikanan PNS yang Diusulkan untuk Mengikuti Uji Kompetensi di Satker BPPP Ambon (Orang), IKU 10 : Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha Yang Disuluh oleh Satker BPPP Ambon, IKU 11 : Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya oleh Satker BPPP Ambon (Kelompok), IKU 12 : Kelompok kelautan dan perikanan Yang Dibentuk di Satker BPPP Ambon (Kelompok), IKU 11 : Tenaga kerja yang terlibat bidang penyuluhan Satker BPPP Ambon (orang) dan IKU 12 : Fasilitasi Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan perizinan berusaha di Satker BPPP Ambon (Pelaku Usaha).

Indikator Kinerja 9

Jumlah Penyuluh Perikanan PNS yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi di Satker BPPP Ambon (Orang)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Penyuluh KP yang diusulkan mengikuti uji kompetensi sesuai dengan persyaratan uji kompetensi. Peserta yang

mendapatkan sertifikat kompetensi adalah yang sudah dinyatakan lulus sesuai dengan persyaratan dan ujian. Sertifikat dikeluarkan oleh Biro SDMAO KKP.

IKU ini baru ada pada tahun 2024, cara perhitungannya dengan menghitung jumlah Penyuluh perikanan yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi di Satker BPPP Ambon. Sampai akhir Tahun 2024, BPPP Ambon telah mengusulkan 3 orang penyuluh perikanan PNS untuk diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi di Satker BPPP Ambon.

Tabel 21. Capaian jumlah penyuluh perikanan PNS yang mengikuti uji kompetensi Satker BPPP Ambon (Orang)

IKU 9-Jumlah penyuluh perikanan PNS yang mengikuti uji kompetensi satker BPPP Ambon (Orang)									
Realisasi				Tahun 2024				Renstra BPPP Ambon 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
0	0	0	0	2	3	150 (120)	200	2	150

Capaian indikator ini telah mencapai 3 orang dari target yaitu 2 orang. Jika dibandingkan dengan Capaian indikator dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar 200%. Terhadap target Renstra tahun 2024, capaian tahun 2024 sebesar 150%.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 22. Perbandingan realisasi jumlah penyuluh perikanan PNS yang mengikuti uji kompetensi Satker BPPP Ambon (Orang)

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	3	5	120
2	BPPP Banyuwangi	10	15	120
3	BPPP Bitung	2	3	120
4	BPPP Ambon	2	3	120
5	BPPP Medan	3	4	120

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini pada akhir tahun adalah penyuluh aktif memahami peraturan terkait tugas pokok dan fungsi penyuluhan perikanan dan memiliki data dukung penyuluhan yang lengkap sesuai dengan format yang telah ditetapkan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Uji kompetensi dapat dilaksanakan dengan metode Asesmen Jarak Jauh sehingga dapat mengefisiensi biaya perjalanan penyuluh ke tempat uji kompetensi
2. Bukti Portofolio yang dibutuhkan dapat berupa soft copy yang dimasukkan kedalam link Goggle Drive sehingga mengefisiensi biaya hard copy.

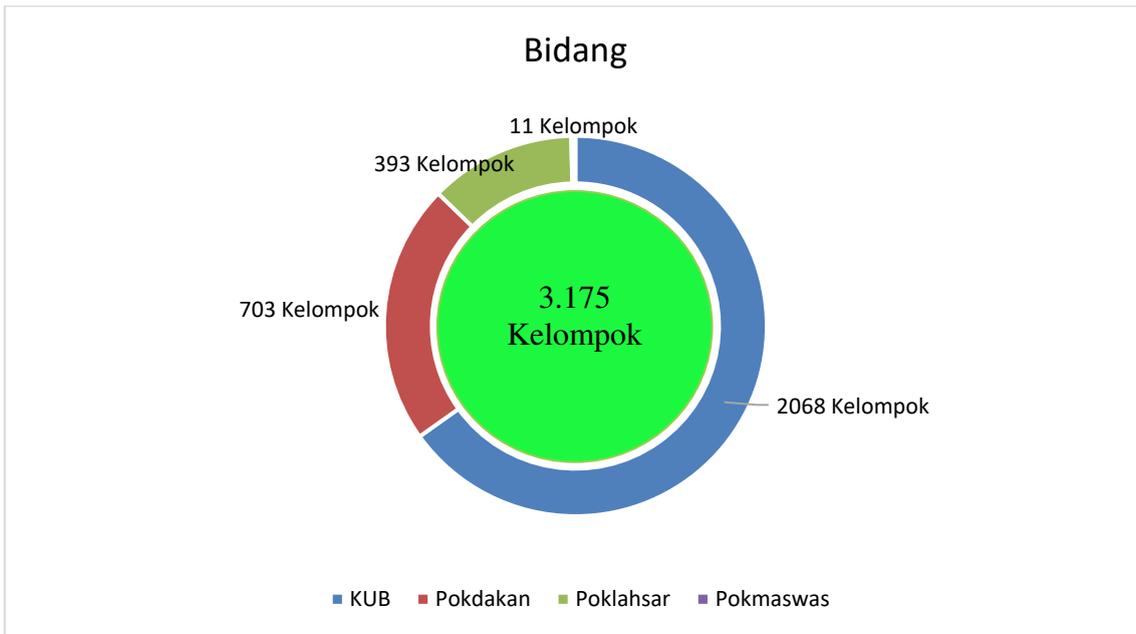
Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2024, BPPP Ambon memiliki kegiatan strategis berupa aktif melakukan sosialisasi terkait materi yang akan diujikan kepada penyuluh yang akan dilakukan uji kompetensi sehingga diharapkan penyuluh yang dilakukan uji kompetensi dapat dinyatakan kompeten dalam bidangnya.

Indikator Kinerja 10

Kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang disuluh oleh Satker BPPP Ambon (Kelompok).

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama dan pelaku usaha yang disuluh oleh Penyuluh Perikanan. Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan diantaranya seperti: Pendampingan kelompok, penilaian kelas kelompok, pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi/teknologi, pembinaan UMKM dan Koperasi, pendampingan kelompok penerima bantuan dengan perhitungan dilakukan setiap triwulan.

IKU ini sudah ada sejak tahun 2018 pada saat penyuluh perikanan di daerah bergabung dengan pusat sehingga terbentuk Satuan Administrasi Pangkal di BPPP Ambon pada tahun 2017, akan tetapi pola perhitungannya adalah perhitungan secara individu atau perorangan dengan realisasi pada tahun 2018 sebanyak 25.358 orang, pada tahun 2019 sebanyak 34.500 orang, pada tahun 2020 sebanyak 2.686 kelompok dan pada tahun 2021 sebanyak 2.641 kelompok, sampai akhir tahun 2024 Penyuluh Satminkal BPPP Ambon sudah melakukan penyuluhan sebanyak 3.175 kelompok dari target Tahun 2024 kelompok yang disuluh sebanyak 3.000 kelompok sehingga nilai pencapaiannya sudah 105,83 %.



Gambar 13. Jumlah Kelompok yang disuluh per bidang

Tabel 23. Capaian Jumlah kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang disuluh di Satminkal BPPP Ambon

IKU-10. Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha yang disuluh di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)									
Realisasi				Tahun 2024				Renstra BPPP Ambon 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
2686	2641	3012	3015	3000	3175	105,83	5,31	5.000	63,50

Capaian indikator ini telah mencapai 3.175 kelompok dari target yaitu 3.000 kelompok. Jika dibandingkan dengan Capaian indikator dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2024, terjadi peningkatan sebesar 5,31%. Terhadap target Renstra tahun 2024, capaian tahun 2024 sebesar 63,50%.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 24. Perbandingan realisasi jumlah kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang disuluh dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	6400	6400	100
2	BPPP Banyuwangi	6100	6119	100,31
3	BPPP Bitung	3450	3476	100,75
4	BPPP Ambon	3000	3175	105,83
5	BPPP Medan	6200	6352	102,45

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya Peraturan Kepala BRSDM KP nomor 63 tahun 2022 tentang pedoman kerja penyuluh perikanan, asisten penyuluh perikanan penyuluh perikanan PPTK dan penyuluh perikanan bantu.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran tunjangan kinerja penyuluh PNS dan BOP PNS serta PPB dapat terealisasi secara optimal dengan disertai capaian kinerja yang telah ditetapkan kepada masing-masing penyuluh berdasarkan perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan.
2. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun sehingga diharapkan seluruh target kinerja individu penyuluh yang tercascading langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2024, BPPP Ambon memiliki kegiatan strategis, yaitu masing-masing penyuluh tetap melaksanakan pendampingan terhadap kelompok perikanan dan kelautan yang disuluh sesuai dengan wilayah binaannya berdasarkan perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan.



Gambar 14. Penyuluhan Pada Kelompok pengolahan hasil perikanan di Kota Ternate

Gambar 15. Penyuluhan Pada Kelompok pengolahan hasil perikanan di Kota Ambon



Indikator Kinerja 11

Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya oleh satker BPPP Ambon (Kelompok).

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelas kelompoknya sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan dengan perhitungan dilakukan setiap triwulan.

IKU ini sudah ada sejak tahun 2018 pada saat penyuluh perikanan di daerah bergabung dengan pusat sehingga terbentuk Satuan Administrasi Pangkal di BPPP Ambon pada tahun 2017, akan tetapi pola perhitungannya adalah perhitungan secara individu atau perorangan dengan realisasi pada tahun 2018 sebanyak 25.358 orang, tahun 2019 sebanyak 34.500 orang, tahun 2020 sebanyak 240 Kelompok, tahun 2021 sebanyak 38 kelompok dan tahun 2022 sebanyak 73 kelompok.

Sampai akhir tahun 2024, Penyuluh Satminkal BPPP Ambon telah melakukan peningkatan kelas kelompok pelaku utama/pelaku usaha di Satminkal BPPP Ambon sebanyak 98 kelompok dari target sebanyak 90 kelompok sehingga nilai pencapaiannya sudah 108,89%.



Gambar 16. Jumlah Kelompok yang ditingkatkan

Tabel 25. Capaian Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya oleh satker BPPP Ambon

IKU-11. Kelompok Kelautan dan Perikanan ditingkatkan kelasnya di Satker BPPP Ambon (Kelompok)										
Realisasi				Tahun 2024				Renstra BPPP Ambon 2020 – 2024		
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024	
0	38	73	88	90	98	108,89	11,36	100	98	

Capaian indikator ini telah mencapai 98 kelompok dari target yaitu 90 kelompok. Jika dibandingkan dengan Capaian indikator dengan tahun sebelumnya yaitu tahun

2023, terjadi peningkatan sebesar 11,36%. Terhadap target Renstra tahun 2024, capaian tahun 2024 sebesar 98%.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 26. Perbandingan realisasi Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di satker BPPP Ambon dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	255	255	100
2	BPPP Banyuwangi	302	310	102,65
3	BPPP Bitung	190	190	100
4	BPPP Ambon	90	98	108,89
5	BPPP Medan	215	225	104,65

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya Peraturan Kepala BRSDM KP nomor 63 tahun 2022 tentang pedoman kerja penyuluh perikanan, asisten penyuluh perikanan penyuluh perikanan PPTK dan penyuluh perikanan bantu.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran tunjangan kinerja penyuluh PNS dan BOP PNS serta PPB dapat terealisasi secara optimal dengan disertai capaian kinerja yang telah ditetapkan kepada masing-masing penyuluh.
2. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun sehingga diharapkan seluruh target kinerja individu penyuluh yang tercasading langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2024, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Masing-masing penyuluh tetap melaksanakan pendampingan terhadap kelompok perikanan dan kelautan yang disuluh sesuai dengan wilayah binaannya.
2. Penyuluh melakukan pendampingan kelompok dan telah mengidentifikasi dan melakukan peningkatan kelas kelompok terhadap calon kelompok dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan melalui pendampingan yang dilakukan.
3. Surat Keputusan dan verifikasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pejabat Pemerintah Daerah telah ditetapkan.



Gambar 17. Peningkatan Kelas Kelompok di Kota Ternate

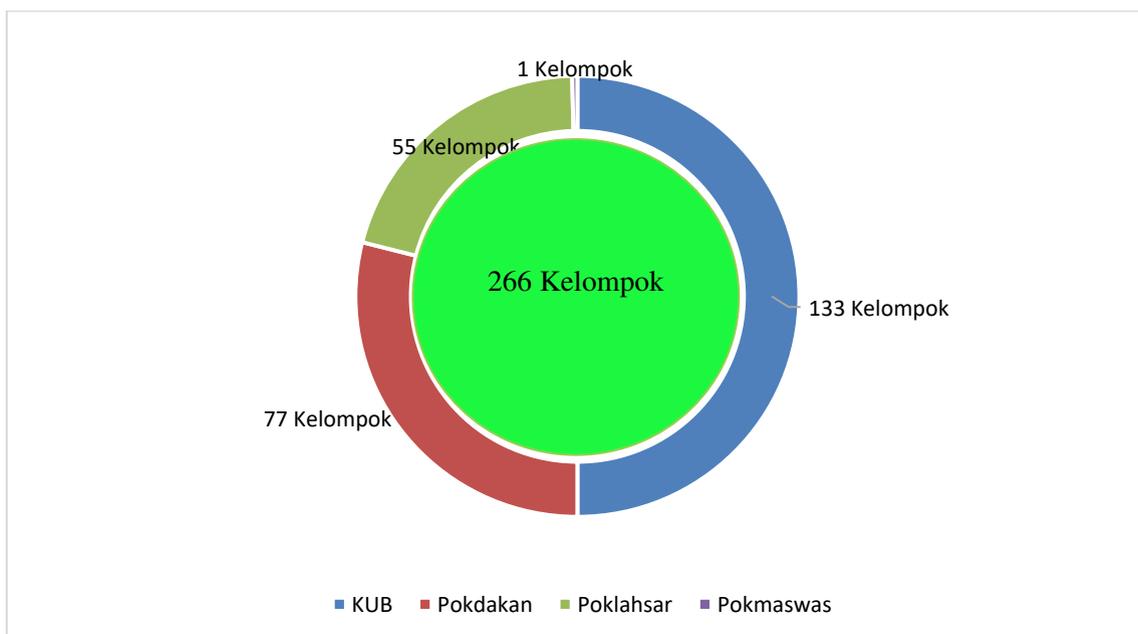
Indikator Kinerja 12

Kelompok Kelautan dan Perikanan yang dibentuk di Satker BPPP Ambon (Kelompok).

Merupakan indikator yang menunjukkan kelompok pelaku utama Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dan dibentuk dengan kriteria pembentukan kelompok sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan dengan perhitungan dilakukan setiap triwulan.

IKU ini sudah ada sejak tahun 2018 pada saat penyuluh perikanan di daerah bergabung dengan pusat sehingga terbentuk Satuan Administrasi Pangkal di BPPP Ambon pada tahun 2017, namun merupakan target antara Seksi Penyuluhan dengan penyuluh Satminkal dengan target sebanyak 70 % penyuluh yang melakukan penilaian kelas kelompok. Pada tahun 2019 nilai pencapaian IKU ini sudah mencapai 1.462 unit, tahun 2020 nilai pencapaiannya sebanyak 136 kelompok, tahun 2021 nilai pencapaiannya sebanyak 130 kelompok dan tahun 2022 nilai pencapaiannya sebanyak 232 kelompok, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung Jumlah kelompok Pelaku utama yang dibentuk yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penumbuhan kelompok yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan.

Sampai akhir tahun 2024, Penyuluh Satminkal BPPP ambon telah melakukan pendataan calon kelompok yang ditumbuhkan kelompoknya sebanyak 266 kelompok dari target tahun 2024 sebanyak 240 kelompok sehingga persentase didapat sebesar 110,83%.



Gambar 18. Jumlah Kelompok yang dibentuk

Tabel 27. Capaian Kelompok Kelautan dan Perikanan yang dibentuk di Satminkal BPPP Ambon

IKU-12. Kelompok Kelautan dan Perikanan yang dibentuk di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)									
Realisasi				Tahun 2024				Renstra BPPP Ambon 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
136	130	232	200	240	266	110,83	33	500	53,20

Capaian indikator ini telah mencapai 266 kelompok dari target yaitu 240 kelompok. Jika dibandingkan dengan Capaian indikator dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar 33%. Terhadap target Renstra tahun 2024, capaian tahun 2024 sebesar 53,20%.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 28. Perbandingan realisasi Kelompok Kelautan dan Perikanan yang dibentuk dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	511	511	100
2	BPPP Banyuwangi	581	591	101,72
3	BPPP Bitung	390	396	101,54
4	BPPP Ambon	240	266	110,83
5	BPPP Medan	560	609	108,75

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya Peraturan Kepala BRSDM KP nomor 63 tahun 2022 tentang pedoman kerja penyuluh perikanan, asisten penyuluh perikanan PPTK dan penyuluh perikanan bantu.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran tunjangan kinerja penyuluh PNS dan BOP PNS serta PPB dapat terealisasi secara optimal dengan disertai capaian kinerja yang telah ditetapkan kepada masing-masing penyuluh.
2. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun sehingga diharapkan seluruh target kinerja individu penyuluh yang tercasading langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2024, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Masing-masing penyuluh tetap melaksanakan pendampingan terhadap kelompok perikanan dan kelautan yang disuluh sesuai dengan wilayah binaannya.
2. Antusias masyarakat pelaku usaha KP untuk menjadi kelompok perikanan pada tahun 2024.



Gambar 19. Penumbuhan kelompok di Kota Jayapura

Gambar 20. Penumbuhan kelompok di Kota Ambon



Indikator Kinerja 13

Tenaga kerja yang terlibat Bidang Penyuluhan Satker BPPP Ambon (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat/operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik di sektor kelautan dan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran produk perikanan, pengelolaan ruang laut, penyuluhan pelatihan serta karantina ikan. Tenaga kerja yang terlibat langsung di lingkup

BPPSDM diantaranya : Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) dan UMKM yang disuluh dengan perhitungan dilakukan pada akhir tahun.

Sampai akhir Tahun 2024, BPPP Ambon telah identifikasi tenaga kerja yang terlibat satker BPPP Ambon sebanyak 430 orang.

Tabel 29. Capaian Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Penyuluhan Satker BPPP Ambon (Orang)

IKU-13. Tenaga kerja yang terlibat bidang penyuluhan satker BPPP Ambon (Orang)									
Realisasi				Tahun 2024				Renstra BPPP Ambon 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
0	0	620	394	370	430	116,22	9,14	370	116,22

Capaian indikator ini telah mencapai 430 orang dari target yaitu 370 orang. Jika dibandingkan dengan Capaian indikator dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar 9,14%. Terhadap target Renstra tahun 2024, capaian tahun 2024 sebesar 116,22%.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 30. Perbandingan realisasi Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Penyuluhan Satker BPPP Ambon (Orang)

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	1897	1897	100
2	BPPP Banyuwangi	1930	2453	120
3	BPPP Bitung	1061	1061	100
4	BPPP Ambon	370	430	116,22
5	BPPP Medan	1744	1752	100,46

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini pada akhir tahun adalah tersedianya instrumen tenaga kerja yang terlibat dengan BPPP Ambon baik yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan maupun pengelola Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Efisiensi biaya perjalanan petugas identifikasi tenaga kerja yang terlibat dengan BPPP Ambon secara langsung sehingga dapat dialihkan untuk kegiatan strategis yang lain yang mendukung peningkatan kinerja BPPP Ambon.
2. Kemudahan petugas identifikasi tenaga kerja yang terlibat dengan BPPP Ambon dalam merekap hasil evaluasi pasca pelatihan dikarenakan hasil yang dikirim sudah dalam bentuk softcopy sesuai dengan format kuisioner yang ditetapkan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2024, BPPP Ambon memiliki kegiatan strategis berupa Sosialisasi peranan penyuluh perikanan baik PNS, PPB dan Swadaya dalam mengidentifikasi tenaga kerja yang terlibat dengan BPPP Ambon

Indikator Kinerja 14

Fasilitasi Kelompok Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha di Satker BPPP Ambon (Kelompok)

Merupakan indikator yang menunjukkan Usaha Mikro, Kecil, yang merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan

ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemertaan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Tujuan dari Izin berusaha adalah : mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan; mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke Lembaga keuangan bank dan non bank; mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau Lembaga lainnya.

IKU ini baru ada pada tahun 2024, cara perhitungannya dengan menghitung Jumlah pelaku utama/pelaku usaha KP yang memenuhi kriteria yang telah dilakukan pendampingan oleh penyuluh yang akan mendapatkan perizinan dalam berusaha. Sampai akhir Tahun 2024, BPPP Ambon telah melakukan fasilitasi kelompok pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan untuk mendapatkan perizinan berusaha di satker BPPP Ambon sebanyak 10 kelompok.

Tabel 31. Capaian Fasilitasi kelompok pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan untuk mendapatkan perizinan berusaha di Satker BPPP Ambon (Kelompok)

IKU-14. Fasilitasi Kelompok Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan Untuk Mendapatkan Perizinan Berusaha di Satker BPPP Ambon (Kelompok)									
Realisasi				Tahun 2024				Renstra BPPP Ambon 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
0	0	0	0	5	10	200 (120)	100	5	200

Capaian indikator ini telah mencapai 10 kelompok dari target yaitu 5 kelompok. Jika dibandingkan dengan Capaian indikator dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar 100%. Terhadap target Renstra tahun 2024, capaian tahun 2024 sebesar 200%.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 32. Perbandingan realisasi Fasilitas kelompok pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan untuk mendapatkan perizinan berusaha di Satker BPPP Ambon (Kelompok)

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	5	5	100
2	BPPP Banyuwangi	15	18	120
3	BPPP Bitung	10	11	110
4	BPPP Ambon	5	10	120
5	BPPP Medan	10	12	120

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini pada akhir tahun adalah penyuluh aktif memahami peraturan terkait tugas pokok dan fungsi penyuluhan perikanan dan memiliki data dukung penyuluhan yang lengkap sesuai dengan format yang telah ditetapkan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran tunjangan kinerja penyuluh PNS dan BOP PNS serta PPB dapat terealisasi secara optimal dengan disertai capaian kinerja yang telah ditetapkan kepada masing-masing penyuluh.
2. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu lokasi percontohan penyuluhan KP yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun sehingga diharapkan target kinerja individu penyuluh yang tercasading langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2024, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Telah menyiapkan instrumen persyaratan Perizinan Berusaha.
2. Bekerjasama dengan Lembaga keuangan bank dan non bank dalam Fasilitasi Kelompok Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan.

Sasaran Kegiatan 5

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP

Untuk mencapai Sasaran Kegiatan Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP terdapat 2 (dua) Indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 15 : Sarana Pelatihan KP Yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit) dan IKU 16 : Prasarana Pelatihan KP Yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit).

Indikator Kinerja 15

Sarana pelatihan KP Yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Ambon (unit).

Merupakan indikator Peningkatan kapasitas sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup BPPP Ambon dengan perhitungan dilakukan pada akhir tahun.

IKU ini merupakan IKU baru yang baru ada pada tahun 2021, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung Jumlah Sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik /belanja modal.

Sampai akhir Tahun 2024, BPPP Ambon telah melakukan pengadaan sarana pelatihan dan penyuluhan KP sehingga penilaiannya sudah 1 unit.

Tabel 33. Capaian Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)

IKU-15. Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)									
Realisasi				Tahun 2024				Renstra BPPP Ambon 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
0	1	2	1	1	1	100	0	1	100

Capaian indikator ini telah mencapai 1 Unit dari target yaitu 1 Unit. Jika dibandingkan dengan Capaian indikator dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023, tidak terjadi peningkatan ataupun penurunan nilai. Terhadap target Renstra tahun 2024, capaian tahun 2024 sebesar 100%.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 34. Perbandingan realisasi Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	3	3	100
2	BPPP Banyuwangi	1	1	100
3	BPPP Bitung	1	1	100
4	BPPP Ambon	1	1	100
5	BPPP Medan	1	1	100

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini pada akhir tahun adalah tersedianya SOP pengadaan dan seluruh Proses pengadaan/pekerjaan sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan di LPSE.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Kegiatan pengadaan/pekerjaan sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan dengan baik dengan menunjuk pihak penyedia yang memiliki kualifikasi yang telah ditetapkan dengan harga penawaran lebih rendah dengan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Pejabat pengadaan barang dan jasa telah memiliki sertifikat kompetensi sehingga proses pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2024, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Kegiatan pengadaan/pekerjaan sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dengan menunjuk pihak penyedia yang memiliki kualifikasi yang telah ditetapkan
2. BPPP Ambon membuat komitmen terkait penyelesaian Kegiatan pengadaan/pekerjaan sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan harus sesuai dengan kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Indikator Kinerja 16

Prasarana pelatihan KP Yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Ambon (unit).

Merupakan indikator Peningkatan kapasitas prasarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup BPPP Ambon dengan perhitungan dilakukan pada akhir tahun.

IKU ini merupakan IKU baru yang baru ada pada tahun 2021, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung Jumlah Prasarana yang berbentuk pembangunan dan renovasi bangunan/belanja modal.

Sampai akhir Tahun 2024, BPPP Ambon telah melakukan proses renovasi bangunan prasarana pelatihan dan penyuluhan KP sehingga penilaiannya sudah 1 unit.

Tabel 35. Capaian Prasarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)

IKU-16. Prasarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)									
Realisasi				Tahun 2024				Renstra BPPP Ambon 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
0	1	1	1	1	1	100	0	1	100

Capaian indikator ini telah mencapai 1 Unit dari target yaitu 1 Unit. Jika dibandingkan dengan Capaian indikator dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023, tidak terjadi peningkatan ataupun penurunan nilai. Terhadap target Renstra tahun 2024, capaian tahun 2024 sebesar 100%.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 36. Perbandingan realisasi Prasarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	4	4	100
2	BPPP Banyuwangi	1	1	100
3	BPPP Bitung	1	1	100
4	BPPP Ambon	1	1	100
5	BPPP Medan	1	1	100

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini pada akhir tahun adalah tersedianya SOP pengadaan dan seluruh Proses pengadaan/pekerjaan sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan di LPSE.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Kegiatan pengadaan/pekerjaan prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan dengan baik dengan menunjuk pihak penyedia yang memiliki kualifikasi yang telah ditetapkan dengan harga penawaran lebih rendah dengan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Pejabat pengadaan barang dan jasa telah memiliki sertifikat kompetensi sehingga proses pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2024, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Kegiatan pengadaan/pekerjaan prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dengan menunjuk pihak penyedia yang memiliki kualifikasi yang telah ditetapkan
2. BPPP Ambon membuat komitmen terkait penyelesaian Kegiatan pengadaan/pekerjaan prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan

Periklanan harus sesuai dengan kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kegiatan 2. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPP Ambon

Sasaran Kegiatan 6

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Ambon

Untuk mencapai Sasaran kegiatan Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Ambon terdapat 10 Indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 17 : Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon, IKU 18 : Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Ambon, IKU 19 : Persentase unit kerja BPPP Ambon yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar, IKU 20 : Indeks profesionalitas ASN BPPP Ambon, IKU 21 : Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas LK BPPP Ambon, IKU 22 : Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja lingkup BPPP Ambon, IKU 23 : Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja BPPP Ambon (Inovasi), IKU 24 : Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Ambon, IKU 25 : Nilai IKPA BPPP Ambon dan IKU 26 : Nilai kinerja perencanaan anggaran BPPP Ambon.

Indikator Kinerja 17

Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%).

Merupakan indikator yang menunjukkan pemenuhan layanan dukungan manajemen internal berupa tersedianya laporan-laporan kegiatan BPPP Ambon.

Perhitungan Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon ini dihitung berdasarkan pemenuhan laporan-laporan kegiatan BPPP Ambon berupa laporan tahunan, laporan pelaksanaan program dan kegiatan dan laporan keuangan.

Perhitungan ini dilakukan setiap triwulan tahun 2024, sesuai dengan data dukung yang telah dikerjakan, sampai akhir Tahun 2024, BPPP Ambon sudah memenuhi dokumen pendukung sebanyak 100% dari target tahun 2024 sebesar 100%.

Tabel 37. Pemenuhan dokumen Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon

No.	Nama Dokumen	Periode Pelaporan	Target Jumlah Dokumen (Tahunan)	Jumlah Dokumen (Triwulan III)
1	Dokumen Perencanaan Anggaran			
	1) Dokumen KAK	Tahunan	1	1
	2) Dokumen RAB	Tahunan	1	1
	3) Dokumen RKAKL	Tahunan	1	1
2	Dokumen Perencanaan Kinerja			
	1) Perjanjian Kinerja	Tahunan	1	1
	2) Rencana Aksi	Tahunan	1	1
	3) Rincian Target IKU	Tahunan	1	1
	4) Manual IKU	Tahunan	1	1
3	Dokumen Reviu Renstra	Tahunan	1	1
4	Dokumen Laporan Kinerja			
	1) LKj Triwulan IV Tahun 2023	Triwulan	1	1
	2) LKj Triwulan I Tahun 2024	Triwulan	1	1
	3) LKj Triwulan II Tahun 2024	Triwulan	1	1
	4) LKj Triwulan III Tahun 2024	Triwulan	1	1
5	Dokumen Laporan SPIP	Mingguan		
	1) Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2023	Triwulan	1	1
	2) Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2024	Triwulan	1	1
	3) Laporan SPIP Triwulan II Tahun 2024	Triwulan	1	1
	4) Laporan SPIP Triwulan III Tahun 2024	Triwulan	1	1
6	Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara	Bulanan		
	1) LPj Bendahara Bulan Desember 2023	Bulanan	1	1
	2) LPj Bendahara Bulan Januari	Bulanan	1	1
	3) LPj Bendahara Bulan Februari	Bulanan	1	1
	4) LPj Bendahara Bulan Maret	Bulanan	1	1
	5) LPj Bendahara Bulan April	Bulanan	1	1
	6) LPj Bendahara Bulan Mei	Bulanan	1	1
	7) LPj Bendahara Bulan Juni	Bulanan	1	1
	8) LPj Bendahara Bulan Juli	Bulanan	1	1
	9) LPj Bendahara Bulan Agustus	Bulanan	1	1
	10) LPj Bendahara Bulan September	Bulanan	1	1
	11) LPj Bendahara Bulan Oktober	Bulanan	1	1
	12) LPj Bendahara Bulan November	Bulanan	1	1

7	Dokumen Laporan PNB	Bulanan		
	1) Bulan Desember 2023	Bulanan	1	1
	2) Bulan Januari	Bulanan	1	1
	3) Bulan Februari	Bulanan	1	1
	4) Bulan Maret	Bulanan	1	1
	5) Bulan April	Bulanan	1	1
	6) Bulan Mei	Bulanan	1	1
	7) Bulan Juni	Bulanan	1	1
	8) Bulan Juli	Bulanan	1	1
	9) Bulan Agustus	Bulanan	1	1
	10) Bulan September	Bulanan	1	1
	11) Bulan Oktober	Bulanan	1	1
	12) Bulan November	Bulanan	1	1
8	Dokumen Weekly Report	Mingguan		
	1) Bulan Januari	Mingguan	1	1
	2) Bulan Februari	Mingguan	1	1
	3) Bulan Maret	Mingguan	1	1
	4) Bulan April	Mingguan	1	1
	5) Bulan Mei	Mingguan	1	1
	6) Bulan Juni	Mingguan	1	1
	7) Bulan Juli	Mingguan	1	1
	8) Bulan Agustus	Mingguan	1	1
	9) Bulan September	Mingguan	1	1
	10) Bulan Oktober	Mingguan	1	1
	11) Bulan November	Mingguan	1	1
	12) Bulan Desember	Mingguan	1	1
9	Dokumen Laporan Program dan Kegiatan	Tahunan	1	1
10	Laporan Keuangan	Semester		
	1) Semester I Tahun 2024	Semester	1	1
11	Laporan BMN	Semester	-	
	1) Semester I Tahun 2024	Semester	1	1
12	Laporan PM SAKIP	Tahunan	1	1
13	Laporan Barang KPA	Tahunan	1	1
14	Laporan PIPK Tahun 2024	Tahunan	1	1
		Jumlah	58	58
		%	100	100

Tabel 38. Capaian Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon

IKU 17- Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)									
Realisasi				Tahun 2024				Renstra BPPP Ambon 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
0	0	0	100	100	100	100	0	100	100

Capaian indikator ini telah mencapai 100% dari target yaitu 100%. Jika dibandingkan dengan Capaian indikator dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023,

tidak terjadi peningkatan maupun penurunan nilai. Terhadap target Renstra tahun 2024, capaian tahun 2024 sebesar 100%.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 39. Perbandingan realisasi Persentase layanan dukungan manajemen internal dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	100	100	100
2	BPPP Banyuwangi	100	100	100
3	BPPP Bitung	100	100	100
4	BPPP Ambon	100	100	100
5	BPPP Medan	100	103,75	103,75

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah tersedianya SOP terkait pembuatan seluruh laporan yang merupakan bagian dari layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini dengan mengetahui Progres capaian IKU triwulanan dapat terpantau dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, mengingat seluruh penyusunan laporan yang merupakan bagian dari layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon tersebut telah didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai sehingga efektifitas dan efisiensi dalam pemenuhan dokumen tersebut dapat dilakukan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2024, BPPP Ambon melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan dan memastikan seluruh dokumen yang telah ditargetkan dapat terpenuhi dengan baik.

Indikator Kinerja 18

Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Ambon (nilai).

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKJ), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang diperjanjikan dalam PK dengan perhitungan dilakukan pada akhir tahun.

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek yaitu:

- a. Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III
- b. Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data
- c. Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2022 pada aplikasi kinerjaku

Sampai akhir Tahun 2024, BPPP Ambon telah melakukan penilaian rekonsiliasi kinerja yang dilakukan oleh Sekertaris BPPSDM KP dan memperoleh nilai sebesar 98,15.

Tabel 40. Capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Ambon (Nilai)

IKU 18- Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Ambon (Nilai)		
Realisasi	Tahun 2024	Renstra BPPP Ambon

								2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
0	97,24	96,83	96,61	94	98,15	104,41	1,59	98	100,15

Capaian indikator ini telah mencapai 98,15 dari target yaitu 94. Jika dibandingkan dengan Capaian indikator dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar 1,59%. Terhadap target Renstra tahun 2024, capaian tahun 2024 sebesar 100,15%.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 41. Perbandingan realisasi Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Ambon (Nilai)

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	94	98,68	104,98
2	BPPP Banyuwangi	94	98,27	104,54
3	BPPP Bitung	94	98,48	104,77
4	BPPP Ambon	94	98,15	104,11
5	BPPP Medan	94	98,7	105

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah tersedianya SOP terkait pembuatan seluruh dokumen dan laporan untuk dapat meningkatkan aspek-aspek kinerja pada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan adanya kegiatan strategis yang telah dilakukan tersebut, progres capaian IKU tahunan dapat terpantau dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, mengingat seluruh pemenuhan dokumen dan laporan harus memiliki konsistensi kepatuhan dalam penyusunan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. SDM yang menangani pemenuhan rekonsiliasi kinerja pun telah memiliki

pemahaman yang baik terkait pemenuhan IKU tersebut dengan mengikuti kegiatan pra rekonsiliasi kinerja yang diselenggarakan oleh Sekretaris BPPSDM KP.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2024, BPPP Ambon melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan dan memastikan seluruh IKU yang merupakan IKU tahunan telah memiliki progress yang nantinya dapat diselesaikan pada akhir tahun 2024.

Indikator Kinerja 19

Persentase unit kerja BPPP Ambon yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan, pengetahuan dan pengalaman dalam organisasi tersebar, tidak terdokumentasi dan bahkan mungkin ada di dalam kepala masing-masing individu dalam organisasi. Manajemen Pengetahuan merupakan upaya meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengelola aset intelektualnya: pengetahuan dan pengalaman yang ada, sehingga dapat dicapai suatu organisasi yang efektif dan efisien.

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari melalui website portal.kkp.go.id.

Sampai akhir Tahun 2024, sistem penilaian manajemen pengetahuan yang terstandar level III mengadopsi langsung nilai capaian level atasannya yaitu Kepala

Pusat Pelatihan KP berdasarkan surat dari Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan No. B.18/BPPSDM.5/RC.610/I/2025 tanggal 06 Januari 2025 tentang capaian nilai akhir IKU Manajemen Pengetahuan terstandar triwulan IV Tahun 2024 lingkup UPT Satuan Kerja Pusat Pelatihan KP yaitu sebesar 120,14%.

Tabel 42. Capaian Persentase unit kerja BPPP Ambon yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar.

IKU-19. Persentase unit kerja BPPP Ambon yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)									
Realisasi				Tahun 2024				Renstra BPPP Ambon 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
333	100	100	116,58	94	120,14	120 (127,81)	3,05	92	130,59

Capaian indikator ini telah mencapai 120,14% dari target yaitu 94%. Jika dibandingkan dengan Capaian indikator dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar 3,05%. Terhadap target Renstra tahun 2024, capaian tahun 2024 telah melebihi target dengan nilai capaian sebesar 130,59%.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 43. Perbandingan realisasi unit kerja BPPP Ambon yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	94	120,14	120
2	BPPP Banyuwangi	94	111,80	118,80
3	BPPP Bitung	94	120,14	120
4	BPPP Ambon	94	120,14	120
5	BPPP Medan	94	120,14	120

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah tersedianya jaringan internet yang memadai dalam media yang *menshared* data sesuai dengan data yang di distribusikan dalam aplikasi *Portal Collaboration Office* dengan perhitungan dilakukan setiap triwulan

Dengan adanya kegiatan strategis yang telah dilakukan tersebut, maka BPPP Ambon dapat melakukan Efisiensi anggaran terkait pemenuhan IKU ini, Subkoordinator Program dan Monev akan mengupload rekapan seluruh pejabat dan operator yang sudah memenuhi data pada aplikasi *Portal Collaboration Office* melalui WA grup yang dapat terbaca oleh seluruh pejabat dan operator untuk dapat ditindaklanjuti dengan segera.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2024, Subkoordinator Program dan Monev secara rutin merekap seluruh pejabat dan operator yang tergabung pada media aplikasi *Portal Collaboration Office* sebelum akhir bulan berjalan pada WA grup Balai dan mengingatkan kepada pejabat dan operator yang belum mengupload data agar dapat segera mengupload pada akun masing-masing.

Indikator Kinerja 20

Indeks profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks).

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan

kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Nilai IKU ini diperoleh berdasarkan dashboard IP ASN pada laman <https://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2023/unker/962?page=1>. Dan berdasarkan surat dari BPPSDM KP No. B.222/BPPSDM.1/TU.210/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Capaian IP ASN Lingkup BPPSDM Tahun 2025 diperoleh akhir sebesar 84,11

Tabel 44. Capaian Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (Indeks)

IKU-20. Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (Indeks)									
Realisasi				Tahun 2024				Renstra BPPP Ambon 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
76,28	77,18	80,67	85,87	81	84,11	103,84	-2,05	81	103,84

Capaian indikator ini telah mencapai 84,11 dari target yaitu 81. Jika dibandingkan dengan Capaian indikator dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023, terjadi penurunan nilai sebesar 2,05%. Terhadap target Renstra tahun 2024, capaian tahun 2024 telah melebihi target dengan nilai capaian sebesar 103,84%.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 45. Perbandingan realisasi Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (Indeks)

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	81	82,73	102,14
2	BPPP Banyuwangi	81	83,04	102,52
3	BPPP Bitung	81	82,99	102,46
4	BPPP Ambon	81	84,11	103,84
5	BPPP Medan	81	87,84	108,44

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah komitmen seluruh pegawai di lingkup BPPP Ambon, operator simpeg dan pengelola kepegawaian lainnya. Untuk mendapatkan data-data terkini, masing-masing pegawai dapat mengunggah dokumen bukti diklat-diklat yang diikuti dan melakukan entri data diklat atau seminar yang diikuti, atau menyerahkan kepada operator simpeg untuk dilakukan entri data sehingga nilai kompetensi pegawai dapat sesuai. Media sosial *Whatsapp* menjadi salah satu alat komunikasi untuk penyampaian pemutakhiran data, dan memonitor pergerakan nilai sehingga target IKU ini dapat tercapai.

Peningkatan atau keberhasilan tercapainya target Nilai IP ASN BPPP Ambon ini antara lain disebabkan oleh:

1. Terdapat pegawai lingkup BPPP Ambon yang mendapatkan peningkatan pendidikan, sehingga kualifikasi pendidikannya meningkat;
2. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan dan seminar daring;
3. Komitmen pimpinan dan kesadaran untuk meningkatkan kompetensi secara daring;
4. Kesadaran pegawai untuk menyampaikan sertifikat pengembangan kompetensi kepada pengelola kepegawaian; dan
5. Keaktifan pengelola kepegawaian dalam mengingatkan dan memutakhirkan data peningkatan kompetensi maupun pendidikan.

Indikator Kinerja 21

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas LK BPPP Ambon (%).

Merupakan indikator batas tertinggi presentase temuan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPPP Ambon dibandingkan realisasi tahun 2021.

IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2018, realisasi pada tahun 2018 sebesar 0 %, pada tahun 2019 juga sebesar 0%, pada tahun 2020 sebesar 0,01%, pada tahun 2022 sebesar 0,01% dan pada tahun 2022 sebesar 0%.

Salah satu untuk menciptakan pengelolaan yang bersih adalah pemeriksaan rutin oleh BPK. Pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

IKU ini merupakan hasil penilaian dari level atasannya yaitu dari BPPSDM KP yang dihitung akhir tahun 2024. Perhitungan ini berdasarkan total temuan nilai kepatuhan dibandingkan dengan pagu total yang bersifat minimize artinya semakin kecil realisasi dibandingkan dengan target maka semakin besar pula nilai capaian kinerja yang diperoleh.

Proses penilaian IKU ini bersifat tahunan dan berdasarkan surat dari Inspektorat Jenderal III No. T.8/ITJ.3/HP.550/I/2025 tanggal 4 Januari 2025 perihal Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen KKP Pada BPPSDMKP Triwulan IV Tahun 2024 BPPP Ambon memperoleh nilai 0 dikarenakan seluruh temuan telah diselesaikan.

Tabel 46. Capaian Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPP Ambon (%)

IKU-21. Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPP Ambon (%)									
Realisasi				Tahun 2024				Renstra BPPP Ambon 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
0	0	0	0	0,5	0	120	0	0,5	120

Capaian indikator ini telah mencapai 0 dari target yaitu 0,5 dan IKU ini bersifat minimize artinya semakin kecil hasil capaian maka semakin bagus nilai yang diperoleh. Jika dibandingkan dengan Capaian indikator dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023, tidak terjadi peningkatan atau penurunan nilai. Terhadap target Renstra tahun 2024, capaian tahun 2024 telah melebihi target dengan nilai capaian sebesar 120%.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 47. Perbandingan realisasi Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPP Ambon (%)

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	0,5	0,04	120
2	BPPP Banyuwangi	0,5	0,1	120
3	BPPP Bitung	0,5	0,1	120
4	BPPP Ambon	0,5	0	120
5	BPPP Medan	0,5	0	120

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini pada akhir tahun adalah tersedianya SOP terkait penggunaan anggaran yang

dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya kegiatan strategis yang telah dilakukan tersebut, progress capaian IKU tahunan dapat terpantau dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, mengingat seluruh penggunaan anggaran yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2024, BPPP Ambon melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan dan memastikan seluruh IKU yang merupakan IKU tahunan telah memiliki progress yang nantinya dapat diselesaikan pada akhir tahun 2024

Indikator Kinerja 22

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan I s.d. Triwulan IV Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh unit Eselon I lingkup KKP.

Cara perhitungan IKU ini dengan cara Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sebanyak 70% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran.

$$\% \text{ Rekomendasi} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen}}{\text{Jumlah Rekomendasi Yang Sudah Ditindaklanjuti Secara Tuntas}} \times 100\%$$

IKU ini merupakan hasil penilaian dari level atasannya yaitu dari BPPSDM KP yang akan dihitung setiap triwulanan dan berdasarkan surat dari Sekertaris BPPSDM KP Nomor B.185/BPPSDM.1/RC.610/I/2025 tanggal 09 Januari 2025 tentang Capaian IKU Presentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja unit eselon I lingkup KKP Tahun 2024, BPPP Ambon memperoleh nilai sebesar 100% dari target tahun 2024 sebesar 82%.

Tabel 48. Capaian Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon

IKU-22. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja lingkup BPPP Ambon (%)									
Realisasi				Tahun 2024				Renstra BPPP Ambon 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
0	0	100	100	82	100	120 (121,95)	0	80	125

Capaian indikator ini telah mencapai 100% dari target yaitu 82%. Jika dibandingkan dengan Capaian indikator dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023, tidak terjadi perubahan. Terhadap target Renstra tahun 2024, capaian tahun 2024 sebesar 125%.

Realisasi kinerja IKU ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 49. Perbandingan realisasi persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	82	100	120
2	BPPP Banyuwangi	82	100	120
3	BPPP Bitung	82	100	120
4	BPPP Ambon	82	100	120
5	BPPP Medan	82	100	120

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah tersedianya SOP terkait pengisian aplikasi SIDAK KKP yang merupakan bagian dari penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja.

Kegiatan strategis yang telah dilakukan adalah peningkata kompetensi operator yang menangani aplikasi SIDAK KKP sehingga progres capaian IKU tahunan dapat terpantau dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, pengisian aplikasi SIDAK KKP sesuai dengan SOP turut memberikan kontribusi yang baik terhadap pemenuhan capaian IKU tersebut.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2024, BPPP Ambon melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan dan memastikan seluruh IKU yang merupakan IKU tahunan telah memiliki progres yang nantinya dapat diselesaikan pada akhir tahun 2024.

Indikator Kinerja 23

Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja BPPP Ambon (Inovasi)

Merupakan usulan proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup BPPP Ambon dengan persyaratan sebagai berikut :

- KRITERIA INOVASI : Memiliki Kebaruan, Efektif, Bermanfaat, Dapat Ditransfer/Direplikasi dan Berkelanjutan
- KELOMPOK INOVASI : Kelompok Umum, Kelompok Khusus

IKU ini merupakan IKU baru yang ada pada tahun 2023, cara perhitungannya dengan menghitung jumlah Proposal inovasi yang masuk kedalam berita acara tim penilai internal KKP dengan nilai minimum 75.

Sampai pada akhir tahun 2024, BPPP Ambon telah mengajukan proposal pada dan telah diterbitkan nota dinas dari Sekertariat Jenderal dengan nomor B.893/SJ/TU.220/VIII/2024 tanggal 09 Agustus 2024 tentang penyampaian berita

acara hasil sidang pleno penilaian proposal inovasi pelayanan publik Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga nilai pencapaiannya sebesar 1 unit.

Tabel 50. Capaian Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja BPPP Ambon (Inovasi)

IKU-23. Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada unit Kerja BPPP Ambon (Inovasi)									
Realisasi				Tahun 2024				Renstra BPPP Ambon 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
0	0	0	1	1	1	100	0	1	100

Capaian indikator ini telah mencapai 1 inovasi dari target yaitu 1 inovasi. Jika dibandingkan dengan Capaian indikator dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023, tidak terjadi perubahan. Terhadap target Renstra tahun 2024, capaian tahun 2024 sebesar 100%.

Realisasi kinerja IKU ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 51. Perbandingan realisasi Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja BPPP Ambon (Inovasi)

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	1	1	100
2	BPPP Banyuwangi	1	1	100
3	BPPP Bitung	1	1	100
4	BPPP Ambon	1	1	100
5	BPPP Medan	1	1	100

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya aplikasi SiPintar. Dengan adanya aplikasi "Sistem Pelatihan Terintegrasi Berbasis *Smartphone* Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon (SiPintar

BPPP Ambon) menjadi sebuah sistem yang fleksibel dan mudah diakses, kapanpun, dimanapun dan oleh siapapun serta data pelatihan terintegrasi melalui aplikasi berbasis "Smartphone", informasi tersaji lebih cepat, tepat sesuai kebutuhan dan terjamin akurasiya. Kualitas pelayanan publik pun meningkat dengan terintegrasinya kegiatan pelatihan baik teknis maupun manajerial dibidang perikanan, efisiensi waktu dan biaya, pemantauan/pendampingan kegiatan usaha pasca mengikuti kegiatan pelatihan secara rill time dan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor Pelatihan KP.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Aplikasi SiPintar yang telah memiliki fitur-fitur kegiatan pelatihan mulai dari hulu sampai hilir
2. Promosi dengan menggunakan media sosial lebih meningkatkan ruang lingkup promosi bahkan sampai luar Provinsi Maluku, sehingga dapat mengefisiensi anggaran promosi dan petugas yang melakukan promosi tersebut.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada Tahun 2023, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Identifikasi kebutuhan pelatihan telah menggunakan aplikasi SiPintar
2. Pendaftaran peserta pelatihan telah menggunakan aplikasi SiPintar
3. Survei kepuasan masyarakat dan pengaduan telah menggunakan aplikasi SiPintar

Indikator Kinerja 24

Penilaian Mandiri SAKIP Satker BPPP Ambon (Nilai)

Penilaian Mandiri SAKIP Satker dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Satker .

IKU ini merupakan IKU baru yang ada pada tahun 2023, cara perhitungannya dengan menghitung nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri dari Tim SAKIP BPPSDM. Sampai pada akhir tahun 2024, BPPP Ambon telah melakukan penilaian SAKIP sesuai dengan Surat dari Kepala BPPSDM KP No. B.5090/BPPSDM.1/RC.510/VII/2024 Tanggal 1 Juli 2024 Perihal Hasil Penilaian mandiri SAKIP Level 3 BPPSDM dengan perolehan nilai sebesar 82,55.

Tabel 52. Capaian Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Ambon (Nilai)

IKU-24. Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Ambon (Nilai)									
Realisasi				Tahun 2024				Renstra BPPP Ambon 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
0	0	0	82,45	78	82,55	105,83	0,12	78	105,83

Capaian indikator ini telah mencapai 82,55 dari target yaitu 78. Jika dibandingkan dengan Capaian indikator dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023, terjadi peningkatan nilai sebesar 0,12%. Terhadap target Renstra tahun 2024, capaian tahun 2024 sebesar 105,83%.

Realisasi kinerja IKU ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka

perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 53. Perbandingan realisasi Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Ambon (Nilai)

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	75	83,9	120
2	BPPP Banyuwangi	78	83,65	107,24
3	BPPP Bitung	78	83,15	106,6
4	BPPP Ambon	78	82,55	105,83
5	BPPP Medan	78	83,15	106,6

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya aplikasi Kinerjaku yang telah memuat menu template penilaian mandiri SAKIP sehingga memudahkan dalam penyusunan dokumen penilaian mandiri SAKIP.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani SAKIP
2. Aplikasi Kinerjaku yang memuat menu template penilaian mandiri SAKIP
3. Operator yang menangani penilaian mandiri SAKIP dan Kinerjaku masih petugas yang sama sehingga memudahkan pemahaman pemenuhan dokumen penilaian mandiri SAKIP BPPP Ambon.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada Tahun 2024, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM KP melalui kegiatan *Kick Off Meeting* Implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh BRSDM KP
2. Dokumen penilaian mandiri SAKIP telah disusun dari awal tahun sebagai dokumen persyaratan pemenuhan dokumen Kinerja per triwulan
3. Penyimpanan dokumen penilaian mandiri SAKIP terletak pada Google Drive milik BPPP Ambon

Indikator Kinerja 25

Nilai IKPA BPPP Ambon (nilai).

Nilai IKPA adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.

IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar 90,50%, tahun 2018 sebesar 86,83%, pada tahun 2019 sebesar 95,39%, tahun 2020 sebesar 92,83%, tahun 2021 sebesar 97,44% dan tahun 2022 sebesar 94,48%

Terdapat 12 indikator penilaian yaitu: Pengelolaan UP, Data Kontrak, Kesalahan SPM, Retur SP2D, Hal III DIPA, Revisi DIPA, Penyelesaian tagihan Rekon LPJ, Renkas, Realisasi, PAGU Minus dan Dispensasi SPM.

IKU ini merupakan hasil penilaian dari level atasannya yaitu dari BPPSDM KP yang akan dihitung setiap semesteran dan nilai capaian berdasarkan Nota Dinas dari Sekertariat Jenderal KKP Nomor 196/SJ.2/RC.610/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal Penyampaian capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II tahun 2024 sebesar 97,49.

Tabel 54. Capaian Nilai IKPA BPPP Ambon (Nilai)

IKU-25. Nilai IKPA BPPP Ambon (Nilai)									
Realisasi				Tahun 2024				Renstra BPPP Ambon 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
92,83	97,44	94,48	92,28	93,76	97,49	103,98	5,65	93	104,83

Capaian indikator ini telah mencapai 97,49 dari target yaitu 93,76. Jika dibandingkan dengan Capaian indikator dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023,

terjadi peningkatan nilai sebesar 5,65%. Terhadap target Renstra tahun 2024, capaian tahun 2024 sebesar 104,83%.

Realisasi kinerja IKU ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 55. Perbandingan realisasi Nilai IKPA BPPP Ambon (Nilai)

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	0	0	0
2	BPPP Banyuwangi	93,76	96,76	103,20
3	BPPP Bitung	93,76	100	106,66
4	BPPP Ambon	93,76	97,49	103,98
5	BPPP Medan	93,76	99,15	105,75

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah tersedianya SOP terkait pengisian aplikasi OM SPAN yang merupakan bagian dari Nilai kinerja pelaksanaan anggaran BPPP Ambon.

Dengan adanya kegiatan strategis yang telah dilakukan tersebut, progres capaian IKU tahunan dapat terpantau dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, pengisian aplikasi OM SPAN oleh SDM yang memiliki kompetensi dibidangnya turut memberikan kontribusi yang baik terhadap pemenuhan capaian IKU tersebut.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2024, BPPP Ambon melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan dan memastikan seluruh IKU yang merupakan IKU tahunan telah memiliki progres yang nantinya dapat diselesaikan pada akhir tahun 2024 serta melakukan harmonisasi operator OM SPAN dengan pihak KPPN terkait capaian output masing-masing kegiatan sehingga nilai capaian dapat 100% secara keseluruhan.

Indikator Kinerja 26

Nilai kinerja perencanaan anggaran BPPP Ambon (nilai).

Nilai Kinerja perencanaan anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.

IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar 90,50%, tahun 2018 sebesar 86,83%, pada tahun 2019 sebesar 95,39%, pada tahun 2020 sebesar 92,03%, pada tahun 2021 sebesar 85,51% dan pada tahun 2022 sebesar 86,99%

Proses penilaian IKU ini bersifat tahunan dan berdasarkan nota dinas dari Sekertariat jenderal KKP Nomor 182/SJ.2/TU.210/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan IV TA. 2024 BPPP Ambon memperoleh nilai sebesar 100%.

Tabel 56. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)

IKU-26. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)									
Realisasi				Tahun 2024				Renstra BPPP Ambon 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
92,03	85,51	86,99	82,42	71	100	140,85 (120)	21,33	71	140,85

Capaian indikator ini telah mencapai 100 dari target yaitu 71. Jika dibandingkan dengan Capaian indikator dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023, terjadi peningkatan nilai sebesar 21,33%. Terhadap target Renstra tahun 2024, capaian tahun 2024 sebesar 140,85%.

Realisasi kinerja IKU ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka

perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 57. Perbandingan realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	71	100	120
2	BPPP Banyuwangi	71	100	120
3	BPPP Bitung	71	100	120
4	BPPP Ambon	71	100	120
5	BPPP Medan	71	100	120

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah tersedianya SOP terkait pengisian aplikasi SMART DJA yang merupakan bagian dari Nilai kinerja anggaran BPPP Ambon.

Dengan adanya kegiatan strategis yang telah dilakukan tersebut, progres capaian IKU tahunan dapat terpantau dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, pengisian aplikasi SMART DJA oleh SDM yang memiliki kompetensi dibidangnya turut memberikan kontribusi yang baik terhadap pemenuhan capaian IKU tersebut.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2024, BPPP Ambon melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan dan memastikan seluruh IKU yang merupakan IKU tahunan telah memiliki progres yang nantinya dapat diselesaikan pada akhir tahun 2024.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Penyerapan anggaran BPPP Ambon pada Tanggal 31 Desember 2024, dapat dilihat pada tabel 58 berikut :

Tabel 58. Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

NO.	KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU AKTIF	REALISASI PER 31 DESEMBER 2024		
				REALISASI	%	SISA ANGGARAN
	PROGRAM RISET SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	67.167.543.000	63.948.898.000	63.794.321.332	94,98	3.373.221.668
1	2375.DCC Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan (Base Line)	90.000.000	90.000.000	90.000.000	100,00	-
2	2375. QDD.001 Kelompok pelaku utama/usaha yang mendapat pendampingan dan penyuluhan KP	6.071.340.000	5.774.940.000	5.770.789.029	95,05	300.550.971
3	2375. QDD.002 Masyarakat KP yang mendapatkan percontohan perikanan	2.145.000.000	825.000.000	812.339.874	37,87	1.332.660.126
4	2375. RAL Sarana Bidang kemaritiman, kelautan dan perikanan (Base Line)	596.892.000	596.892.000	596.852.550	99,99	39.450
5	2375. RBQ Prasarana bidang kemaritiman, kelautan dan perikanan (Base Line)	150.000.000	150.000.000	149.714.000	99,81	286.000
6	2375. SCC Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan (Base Line)	5.553.448.000	4.001.203.000	3.999.504.145	72,02	1.553.943.855
7	2378. Layanan Dukungan Manajemen	460.311.000	410.311.000	409.033.414	88,86	51.277.586
8	001 Gaji dan Tunjangan	45.562.340.000	45.562.340.000	45.435.198.230	99,72	127.141.770
9	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	6.538.212.000	6.538.212.000	6.530.890.090	99,89	7.321.910

Secara umum kinerja BPPP Ambon pada tahun 2024 telah dilaksanakan dan capaian kinerja yang dihasil tercapai secara optimal. Namun demikian secara teknis masih tetap perlu dilakukan optimasi pelaksanaan kegiatan seperti sosialisasi kepada penyuluh PNS dan PPB Satminkal BPPP Ambon tentang mekanisme pembayaran BOP sehingga anggaran BOP Penyuluh PNS dan PPB dapat dibayarkan penuh setiap bulannya.

Pemetaan anggaran pendukung indikator kinerja utama BPPP Ambon disajikan dalam bentuk sebagai berikut :

Tabel 59. Pemetaan anggaran pendukung indikator kinerja utama sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	PAGU	REALISASI	% REALISASI
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (%)	19.600.000	19.600.000	100,00
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	5.553.448.000	3.999.504.145	72,02
		3	Nilai PNBSP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	456.824.000	455.410.386	99,69
		4	Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village/SFV) BPPP Ambon yang menerapkan IPTEK KP (Desa)	1.120.550.000	160.531.274	14,33
		5	Kawasan yang mengoptimalkan aset BPPP Ambon untuk Percontohan Pelatihan KP (Kawasan)	1.024.450.000	651.808.600	63,63
		6	Tenaga kerja yang terlibat Bidang Pelatihan Satker BPPP Ambon (Orang)	17.600.000	17.600.000	100,00
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	7	SDM KP Yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (Orang)	90.000.000	90.000.000	100,00
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	8	Lulusan pelatihan yang membentuk <i>start up</i> (usaha rintisan) di BPPP Ambon (Orang)	19.600.000	19.600.000	100,00
4	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	9	Jumlah Peyuluh Perikanan PNS yang mengikuti Uji Kompetensi Satker BPPP Ambon (Orang)	17.000.000	17.000.000	100,00
		10	Kelompok Pelaku utama/Pelaku Usaha KP yang disuluh di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	2.718.176.000	2.417.625.029	88,94
		11	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	1.175.000.000	1.175.000.000	100,00
		12	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang dibentuk di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	175.000.000	175.000.000	100,00
		13	Tenaga kerja yang terlibat Bidang Penyuluhan Satker BPPP Ambon (Orang)	476.740.000	476.740.000	100,00
		14	Fasilitasi Kelompok Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	980.000.000	980.000.000	100,00
5	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP	15	Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	596.892.000	596.852.550	99,99
		16	Prasarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	150.000.000	149.714.000	99,81
6	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Ambon	17	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	45.562.340.000	45.436.463.271	99,72
		18	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Ambon (Nilai)	17.422.000	17.388.982	99,81
		19	Persentase unit kerja BPPP Ambon yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	229.100.000	178.006.005	77,70
		20	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	6.538.212.000	6.530.890.090	99,89
		21	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-R atas LK BPPP Ambon (%)	39.200.000	39.200.000	100,00
		22	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	39.200.000	39.200.000	100,00
		23	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja BPPP Ambon (Inovasi)	55.000.000	55.000.000	100,00
		24	Penilaian Mandiri SAKIP Satker BPPP Ambon (Nilai)	38.578.000	38.576.000	99,99
		25	Nilai IKPA BPPP Ambon (nilai)	30.000.000	30.000.000	100,00
		26	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	27.611.000	27.611.000	100,00

3.4 Efisiensi Anggaran BPPP Ambon

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Penghitungan efisiensi anggaran dapat dilihat pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Dasar hukum terkait penghitungan efisiensi terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran.

Tabel 60. Nilai Efisiensi BPPP Ambon per masing-masing Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR KINERJA	NILAI KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	NILAI EFISIENSI
1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (%)	104,19	19.600.000	19.600.000	100,00	4,19
2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	104,34	5.553.448.000	3.999.504.145	72,02	32,32
3	Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	120,00	456.824.000	455.410.386	99,69	20,31
4	Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village/SFV) BPPP Ambon yang menerapkan IPTEK KP (Desa)	100,00	1.120.550.000	160.531.274	14,33	85,67
5	Kawasan yang mengoptimalkan aset BPPP Ambon untuk Percontohan Pelatihan KP (Kawasan)	100,00	1.024.450.000	651.808.600	63,63	36,37
6	Tenaga kerja yang terlibat Bidang Pelatihan Satker BPPP Ambon (Orang)	120,00	17.600.000	17.600.000	100,00	20,00
7	SDM KP Yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (Orang)	100,00	90.000.000	90.000.000	100,00	-
8	Lulusan pelatihan yang membentuk <i>start up</i> (usaha rintisan) di BPPP Ambon (Orang)	116,67	19.600.000	19.600.000	100,00	16,67
9	Jumlah Peyuluh Perikanan PNS yang mengikuti Uji Kompetensi Satker BPPP Ambon (Orang)	120,00	17.000.000	17.000.000	100,00	20,00
10	Kelompok Pelaku utama/Pelaku Usaha KP yang disuluh di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	105,83	2.718.176.000	2.417.625.029	88,94	16,89

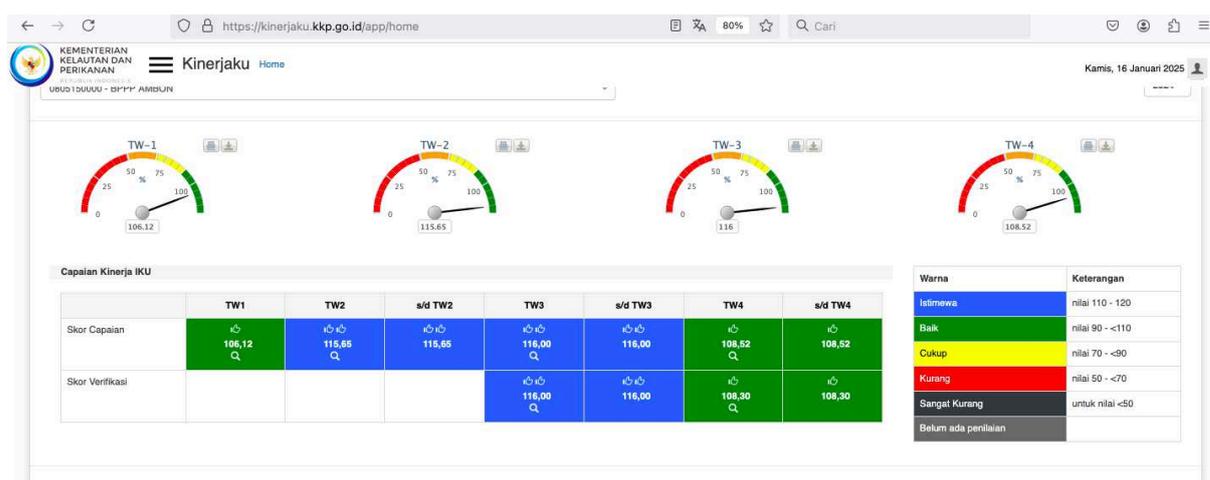
11	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	108,89	1.175.000.000	1.175.000.000	100,00	8,89
12	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang dibentuk di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	110,83	175.000.000	175.000.000	100,00	10,83
13	Tenaga kerja yang terlibat Bidang Penyuluhan Satker BPPP Ambon (Orang)	116,22	476.740.000	476.740.000	100,00	16,22
14	Fasilitasi Kelompok Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	120,00	980.000.000	980.000.000	100,00	20,00
15	Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	100,00	596.892.000	596.852.550	99,99	0,01
16	Prasarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	100,00	150.000.000	149.714.000	99,81	0,19
17	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	100,00	45.562.340.000	45.436.463.271	99,72	0,28
18	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Ambon (Nilai)	104,41	17.422.000	17.388.982	99,81	4,60
19	Persentase unit kerja BPPP Ambon yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	120,00	229.100.000	178.006.005	77,70	42,30
20	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	103,84	6.538.212.000	6.530.890.090	99,89	3,95
21	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-R atas LK BPPP Ambon (%)	120,00	39.200.000	39.200.000	100,00	20,00
22	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	120,00	39.200.000	39.200.000	100,00	20,00
23	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja BPPP Ambon (Inovasi)	100,00	55.000.000	55.000.000	100,00	-
24	Penilaian Mandiri SAKIP Satker BPPP Ambon (Nilai)	105,83	38.578.000	38.576.000	99,99	5,84
25	Nilai IKPA BPPP Ambon (nilai)	103,98	30.000.000	30.000.000	100,00	3,98
26	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	120,00	27.611.000	27.611.000	100,00	20,00
TOTAL		108,30	67.167.543.000	63.794.321.332	94,98	13,32

Efisiensi anggaran BPPP Ambon pada Tahun 2024 memperoleh skor 13,32 dan hal ini dikarenakan karena seluruh IKU telah terealisasi dengan baik.

BAB IV PENUTUP

4.1 Capaian Kinerja Utama

Pada akhir tahun 2024, BPPP Ambon memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 26 Indikator Kinerja Utama. Pengukuran capaian kinerja BPPP Ambon tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indikator*), disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *logical framework* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPPP Ambon sebesar 108,30%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 21. Dashboard Kinerjaku Level 3 BPPP Ambon

Selama tahun 2024, dari 26 IKU yang menjadi target tahun 2024 BPPP Ambon dan semua telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan melebihi target yang telah ditetapkan.

Rincian target dan realiasi dari 26 IKU tersebut adalah:

Tabel 61. Capaian IKU BPPP Ambon tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (%)	72	75,02	104,19
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	2.902	3.028	104,34
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	0,682	3,091	120,00
		4	Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village/SFV) BPPP Ambon yang menerapkan IPTEK KP (Desa)	1	1	100,00
		5	Kawasan yang mengoptimalkan aset BPPP Ambon untuk Percontohan Pelatihan KP (Kawasan)	2	2	100,00
		6	Tenaga kerja yang terlibat Bidang Pelatihan Satker BPPP Ambon (Orang)	4	9	120,00
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	7	SDM KP Yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (Orang)	150	150	100,00
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	8	Lulusan pelatihan yang membentuk <i>start up</i> (usaha rintisan) di BPPP Ambon (Orang)	18	21	116,67
4	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	9	Jumlah Peyuluh Perikanan PNS yang mengikuti Uji Kompetensi Satker BPPP Ambon (Orang)	2	3	120,00
		10	Kelompok Pelaku utama/Pelaku Usaha KP yang disuluh di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	3.000	3.175	105,83
		11	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	90	98	108,89
		12	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang dibentuk di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	240	266	110,83
		13	Tenaga kerja yang terlibat Bidang Penyuluhan Satker BPPP Ambon (Orang)	370	430	116,22
		14	Fasilitasi Kelompok Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	5	10	120,00
5	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP	15	Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	1	1	100,00
		16	Prasarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	1	1	100,00
6	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Ambon	17	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	100	100	100,00
		18	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Ambon (Nilai)	94	98,15	104,41
		19	Persentase unit kerja BPPP Ambon yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94	133,33	120,00
		20	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	81	84,11	103,84
		21	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-R atas LK BPPP Ambon (%)	≤ 0,5	0	120,00
		22	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	82	100	120,00
		23	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja BPPP Ambon (Inovasi)	1	1	100,00
		24	Penilaian Mandiri SAKIP Satker BPPP Ambon (Nilai)	78	82,55	105,83
		25	Nilai IKPA BPPP Ambon (nilai)	93,76	97,49	103,98
		26	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	71	100	120,00

4.2 Permasalahan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi rencana aksi tahun 2024, IKU dengan Target Kinerja Tahunan yang diprediksi tidak tercapai target kinerjanya dikarenakan kurang termonitor setiap triwulannya. Maka dari itu Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan. Penanggung jawab IKU agar memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholders* BPPP Ambon. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BPPP Ambon. Akhirnya, BPPP Ambon berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Abubakar**
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2023

Pihak Kedua

Kepala Pusat Pelatihan dan
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon

Abubakar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (%)	72
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	3.302
		3	Nilai PNPB Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	0,682
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	4	SDM KP Yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (Orang)	150
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	5	Lulusan pelatihan yang membentuk <i>start up</i> (usaha rintisan) di BPPP Ambon (Orang)	18
4	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh di BPPP Ambon (Kelompok)	3.000
		7	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BPPP Ambon (Kelompok)	90
		8	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk di BPPP Ambon (Kelompok)	240
		9	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BPPP Ambon (Orang)	370
5	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	10	Desa/kawasan mitra yang menerapkan lptek KP di BPPP Ambon (Desa Perikanan Cerdas) (Desa)	2
		11	Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di BPPP Ambon (Kelompok)	2
6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP	12	Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	1
		13	Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	1
7	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Ambon	14	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	100
		15	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Ambon (Nilai)	94
		16	Persentase unit kerja BPPP Ambon yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94
		17	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	81
		18	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Ambon (%)	≤ 0,5
		19	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	82
		20	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Ambon (Nilai)	78
		21	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon (nilai)	93,76
		22	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	82

Data Anggaran

NO	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pelatihan dan Penyuluhan KP	15.316.480.000
2	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPSDM	51.765.651.000
Total Anggaran BPPP Ambon		67.082.131.000

Jakarta, 29 Desember 2023

Pihak Kedua

Kepala Pusat Pelatihan dan
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan



Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon



Abubakar



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAN www.kkp.go.id SUREL brsdrm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Abubakar**
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**
Jabatan : Plt. Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 April 2024

Pihak Kedua

Plt. Kepala Pusat Pelatihan
Kelautan dan Perikanan

Lilly Aprilya Pregiwati 

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon


Abubakar

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON**

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (%)	72
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	3.302
		3	Nilai PNBPN Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	0,682
		4	Tenaga kerja yang terlibat Bidang Pelatihan Satker BPPP Ambon (Orang)	4
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	5	SDM KP Yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (Orang)	150
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan Kelautan dan Perikanan	6	Lulusan pelatihan yang membentuk <i>start up</i> (usaha rintisan) di BPPP Ambon (Orang)	18
4	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7	Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	1
		8	Prasarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	1
5	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Ambon	9	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	100
		10	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Ambon (Nilai)	94
		11	Persentase unit kerja BPPP Ambon yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94
		12	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	81
		13	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-R atas LK BPPP Ambon (%)	≤ 0,5
		14	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	82
		15	Penilaian Mandiri SAKIP Satker BPPP Ambon (Nilai)	78
		16	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon (nilai)	93,76
		17	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	82

Data Anggaran

NO	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	6.605.140.000
2	Program Dukungan Manajemen	52.183.863.000
Total Anggaran Pelatihan BPPP Ambon		58.789.003.000

Jakarta, 3 April 2024

Pihak Kedua

Plt. Kepala Pusat Pelatihan
Kelautan dan Perikanan

Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon

Abubakar



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL brsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Abubakar**
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**
Jabatan : Plt. Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 April 2024

Pihak Kedua

Plt. Kepala Pusat Pelatihan
Kelautan dan Perikanan

Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon

Abubakar

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON**

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (%)	72
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	3.302
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	0,682
		4	Tenaga kerja yang terlibat Bidang Pelatihan Satker BPPP Ambon (Orang)	4
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	5	SDM KP Yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (Orang)	150
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan Kelautan dan Perikanan	6	Lulusan pelatihan yang membentuk <i>start up</i> (usaha rintisan) di BPPP Ambon (Orang)	18
4	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7	Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	1
		8	Prasarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	1
5	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Ambon	9	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	100
		10	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Ambon (Nilai)	94
		11	Persentase unit kerja BPPP Ambon yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94
		12	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	81
		13	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-R atas LK BPPP Ambon (%)	≤ 0,5
		14	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	82
		15	Penilaian Mandiri SAKIP Satker BPPP Ambon (Nilai)	78
		16	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon (nilai)	93,76
		17	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	82

Data Anggaran

NO	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	6.605.140.000
2	Program Dukungan Manajemen	52.183.863.000
Total Anggaran Pelatihan BPPP Ambon		58.789.003.000

Jakarta, 3 April 2024

Pihak Kedua

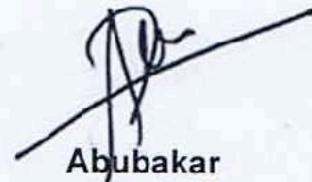
Plt. Kepala Pusat Pelatihan
Kelautan dan Perikanan



Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon



Abubakar



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAN www.kkp.go.id SUREL brsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Abubakar**
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Hendra Yusran Siry**
Jabatan : Plt. Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2024

Pihak Kedua
Plt. Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan

Hendra Yusran Siry

Pihak Pertama
Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon

Abubakar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Penyuluh Perikanan PNS yang mengikuti Uji Kompetensi Satker BPPP Ambon (Orang)	2
		2	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang Disuluh Satker BPPP Ambon (Kelompok)	3.000
		3	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya di satker BPPP Ambon (Kelompok)	90
		4	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	240
		5	Tenaga kerja yang terlibat Bidang Penyuluhan Satker BPPP Ambon (Orang)	370
		6	Fasilitasi Kelompok Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Mendapatkan Perizinan Berusaha di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	5
2	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	7	Desa/Kawasan Mitra yang Menerapkan Iptek di Satker BPPP Ambon (Desa)	2
		8	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang Mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	2
3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	9	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satker BPPP Ambon (Dokumen)	2

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6.071.340.000
2	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPSDM KP	2.640.000.000
Total Anggaran BPPP Ambon		8.711.340.000

Jakarta, April 2024

Pihak Kedua

Plt. Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan



Hendra Yusran Siry

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon



Abubakar



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAN www.kkp.go.id SUREL brsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Abubakar**
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 November 2024

Pihak Kedua

Kepala Pusat Pelatihan
Kelautan dan Perikanan

Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Ambon

Abubakar

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON**

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (%)	72
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	2.902
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	0,68
		4	Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village/SFV) BPPP Ambon yang menerapkan IPTEK KP (Desa)	1
		5	Kawasan yang mengoptimalkan aset BPPP Ambon untuk Percontohan Pelatihan KP (Kawasan)	1
		6	Tenaga kerja yang terlibat Satker BPPP Ambon (Orang)	4
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	7	SDM KP Yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (Orang)	150
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	8	Lulusan pelatihan yang membentuk <i>start up</i> (usaha rintisan) di BPPP Ambon (Orang)	18
4	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP	9	Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	1
		10	Prasarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	1
5	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	11	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	100
		12	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Ambon (Nilai)	94
		13	Persentase unit kerja BPPP Ambon yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94
		14	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	81
		15	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPP Ambon (%)	≤ 0,5
		16	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPP Ambon (%)	82
		17	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja BPPP Ambon (Inovasi)	1
		18	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Ambon (Nilai)	78
		19	Nilai IKPA BPPP Ambon (Nilai)	93,76
		20	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	71

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	8.535.340.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	13.373.358.000
Total Anggaran BPPP Ambon		21.908.698.000

Jakarta, 27 November 2024

Pihak Kedua

Kepala Pusat Pelatihan
Kelautan dan Perikanan

Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Ambon

Abubakar



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN PASIR PUTIH II ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711685
LAMAN www.kkp.go.id SUREL pusluhkp@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Abubakar**
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Yayan Hikmayani**
Jabatan : Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 November 2024

Pihak Kedua

Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan


Yayan Hikmayani

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon


Abubakar

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON**

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Penyuluh Perikanan PNS yang Diusulkan untuk Mengikuti Uji Kompetensi di Satker BPPP Ambon (Orang)	2
		2	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang Disuluh oleh Satker BPPP Ambon (Kelompok)	3.000
		3	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya oleh Satker BPPP Ambon (Kelompok)	90
		4	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk di Satker BPPP Ambon (Kelompok)	240
		5	Tenaga kerja yang terlibat Bidang Penyuluhan Satker BPPP Tegal (Orang)	370
		6	Fasilitasi Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Mendapatkan Perizinan Berusaha di Satker BPPP Ambon (Pelaku Usaha)	5

Data Anggaran

NO	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6.071.340.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPSDM KP	39.187.505.000
Total Anggaran BPPP Ambon		45.258.845.00

Jakarta, 28 November 2024

Pihak Kedua

Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan


Yayan Hikmayani

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Ambon


Abubakar



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

JALAN MARTHA ALFONS, POKA, TELUK AMBON KODE POS 97233

TELEPON (0911) 322710, FAKSIMILE (0911) 322711)

LAMAN : www.bp3ambon-kkp.org , Email : bppp_ambon@kkp.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : B. 16/BPPP.AMB/KP.440/I/2024

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab yang dibebankan kepada BPPP Ambon secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu untuk memberi penugasan kepada Personil Pengumpul Data Kinerja di BPPP Ambon T.A 2024;
 2. Bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam surat tugas ini dianggap mampu memenuhi syarat untuk diberikan tugas sebagai Personil Pengumpul Data Kinerja pada BPPP Ambon T.A 2024;
 3. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satuan Kerja BPPP Ambon Nomor : SP DIPA-032.12.2.238755/2024 tanggal 24 November 2023.

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/A1/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/LL/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 87/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.

Memberi Tugas

Kepada :

No.	Nama/NIP/ Pangkat/Golongan/Jabatan	Jabatan dalam penugasan	Uraian Tugas / Keterangan
1.	Abubakar, S.St.Pi, M.Si 19780427 200312 1 001 Pembina IV/a Kepala Balai	Penanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan ✚ Memberikan arahan dan petunjuk bagi pelaksanaan kegiatan
2.	Rahmawati Umasugi, S.Pi, M.Si 19771101 200312 2 004 Pembina IV/a Analisis Perencana Muda	Ketua	Bertanggungjawab atas data kinerja yang dikumpulkan
3.	Moh. Arief Hidayat, A.Md,S.Pi 19870216 201012 1 002 Penata Muda Tk.I III/b Instruktur Pertama	Anggota (Pokja Dukungan Manajerial)	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Mengumpulkan dan merekap data kinerja pada subkoordinator program dan monev yang terkait dengan data dukung capaian indikator kinerja : <ul style="list-style-type: none"> a. Lulusan pelatihan yang bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon b. Presentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BPPP Ambon c. Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Ambon d. Presentase unit kerja yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BPPP Ambon <p>Data yang dikumpulkan paling lambat tanggal 2 setiap Bulan</p>
4.	Rachel L. Wattimena, S.Pi, M.Si 19730531 200604 2 007 Penata Tk.I III/d Instruktur Muda	Anggota (Pokja Sarpras dan PNBP)	Mengumpulkan dan merekap data kinerja pada subkoordinator Tata Usaha yang terkait dengan data dukung capaian indikator kinerja :

No.	Nama/NIP/ Pangkat/Golongan/Jabatan	Jabatan dalam penugasan	Uraian Tugas / Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Ambon b. Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Ambon c. Indeks profesionalitas ASN lingkup BPPP Ambon d. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon e. Batas tertinggi presentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Ambon dibandingkan realisasi anggaran BPPP Ambon TA. 2023 f. Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon <p>Data yang dikumpulkan paling lambat tanggal 2 setiap Bulan</p>
5.	<p>Johanna L. Thenu, S.Pi, MP 19770415 200502 2 001 Penata Tk.I III/d WI Ahli Muda</p>	<p>Anggota (Pokja Pelatihan)</p>	<p>Mengumpulkan dan merekap data kinerja pada subkoordinator Pelatihan yang terkait dengan data dukung capaian indikator kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lulusan pelatihan yang membentuk rintisan usaha baru di BPPP Ambon b. SDM KP yang dilatih di BPPP Ambon c. Pelaksanaan Pelatihan Masyarakat Berbasis "Full Online Training" di BPPP Ambon d. Tersedianya materi pelatihan berbasis Kaji Widya di BPPP Ambon e. Sertifikasi kelembagaan Pelatihan dan

			Penyuluhan sesuai standar Lembaga f. Data yang dikumpulkan paling lambat tanggal 2 setiap bulan
6.	Arianto Doha 19790616 200701 1 003 Penata Muda III/a Pengelola Data	Anggota (Pokja Penyuluhan)	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Mengumpulkan dan merekap data kinerja pada subkoordinator Penyuluhan yang terkait dengan data dukung capaian indikator kinerja : <ul style="list-style-type: none"> a. Kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh di Satminkal di BPPP Ambon b. Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BPPP Ambon c. Calon kelompok pelaku utama yang disiapkan untuk ditumbuhkan menjadi kelompok pelaku utama perikanan di Satminkal BPPP Ambon d. Desa mitra/kawasan mitra yang menerapkan IPTEK KP di BPPP Ambon e. Percontohan penyuluhan KP yang diterapkan di Satminkal BPPP Ambon <p>Data yang dikumpulkan paling lambat tanggal 2 setiap bulan.</p>

Untuk : 1. Sebagai Personil Pengumpul Data Kinerja BPPP Ambon Tahun 2024;
2. Melaksanakan tugas mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Biaya : DIPA BPPP Ambon.

Ambon, 2 Januari 2024
Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon,



Abubakar, S.St.Pi.,M.Si



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

JALAN MARTHA ALFONS, POKA, TELUK AMBON KODE POS 97233

TELEPON (0911) 322710, FAKSIMILE (0911) 322711)

LAMAMAN : www.bp3ambon-kkp.org , Email : bppp_ambon@kkp.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : B. 17/BPPP.AMB/KP.440/I/2024

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon, perlu membentuk tim teknis tata kelola kinerja di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon;
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, perlu memberi penugasan kepada Tim Teknis Tata Kelola Kinerja di Lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon;
 3. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satuan Kerja BPPP Ambon Nomor : SP DIPA-032.12.2.238755/2024 tanggal 24 November 2023.

- Dasar :
1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2);
 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 190);
 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114).

Memberi Tugas

Kepada :

Penanggung Jawab				
No.	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan dalam penugasan
1.	Abubakar, S.St.Pi, M.Si	19780427 200312 1 001 Pembina IV/a	Kepala Balai	Pengarah
2.	Rahmawati Umasugi, S.Pi, M.Si	19771101 200312 2 004 Pembina IV/a	Perencana Ahli Muda	Penanggung Jawab Tata Kelola Kinerja Manajerial
3.	Ekadasa Priantara, ST, M.Si	19710228 200212 1 002 Pembina IV/a	Instruktur Ahli Muda	Penanggung Jawab Tata Kelola Bidang Pelatihan
4.	A.R Sopaheluwakan, S.Pi, M.Si	19770605 200701 2 003 Pembina IV/a	Analisis Kepegawaian Muda	Penanggung Jawab Tata Kelola Bidang Penyuluhan
5.	Rachel L. Wattimena, S.Pi, M.Si	19730531 200604 2 007 Penata Tk.I III/d	Instruktur Ahli Muda	Penanggung Jawab Tata Kelola Bidang Sarana dan Prasarana dan PNB

Tim Pelaksana Kesekretariatan

No.	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan dalam penugasan
1.	Rahmawati Umasugi, S.Pi, M.Si	19771101 200312 2 004 Pembina IV/a	Perencana Ahli Muda	Ketua
2.	Moh. Arief Hidayat, A.Md., S.Pi	19870216 201012 1 002 Penata Muda Tk.I III/b	Instruktur Pertama	Sekretaris
3.	Dessy Rompis, S.AP	19791222 200312 2 005 Penata Muda III/a	Pengelola Rencana Program dan Kegiatan	Pelaksana Dukungan Manajerial/Manajer Kinerja
4.	Fiona A.B Nikyuluw, S.Pi, M.Si	19750205 200212 2 004 Pembina IV/a	Instruktur Madya	Pelaksana Dukungan Manajerial/Manajer Kinerja
5.	Wahyu Retno Aris, S.St.Pi	19840530 201503 1 001 Penata Muda Tk.I III/b	Instruktur Pertama	Pelaksana Dukungan Manajerial/Manajer Kinerja
6.	La Tati	19680423 199203 1 001 Penata Muda Tk.I / IIIb	Pengadm. Persuratan	Pelaksana Sarpras dan PNB/Manajer Kinerja
7.	Polly S.B Christian, S.St.Pi, M.Si	19770608 200312 1 004 Penata Tk.I III/d	Instruktur Muda	Pelaksana Pelatihan /Manajer Kinerja
8.	Drs. Yohanis Setitit	19660612 200212 1 001 Penata Tk.I / III d	Pengelola Data	Pelaksana Penyuluhan/Manajer Kinerja

Sub-Tim Perencanaan Kinerja				
1.	Rahmawati Umasugi, S.Pi, M.Si	19771101 200312 2 004 Pembina IV/a	Perencana Ahli Muda	Koordinator
2.	Rachel L. Wattimena, S.Pi, M.Si	19730531 200604 2 007 Penata Tk.I III/d	Instruktur Ahli Muda	Anggota
3.	Ekadasa Priantara, ST, M.Si	19710228 200212 1 002 Pembina IV/a	Instruktur Ahli Muda	Anggota
4.	A.R Sopaheluwakan, S.Pi, M.Si	19770605 200701 2 003 Pembina IV/a	Analisis Kepegawaian Muda	Anggota
Sub-Tim Pengukuran dan Pelaporan Kinerja				
1.	Rahmawati Umasugi, S.Pi, M.Si	19771101 200312 2 004 Pembina IV/a	Perencana Ahli Muda	Koordinator
2.	Moh. Arief Hidayat, A.Md., S.Pi	19870216 201012 1 002 Penata Muda Tk.I III/b	Instruktur Pertama	Anggota
3.	Dessy Rompis, S.AP	19791222 200312 2 005 Penata Muda III/a	Pengelola Rencana Program dan Kegiatan	Anggota
4.	Fiona A.B Nikyuluw, S.Pi, M.Si	19750205 200212 2 004 Pembina IV/a	Instruktur Madya	Anggota
5.	Wahyu Retno Aris, S.St.Pi	19840530 201503 1 001 Penata Muda Tk.I III/b	Instruktur Pertama	Anggota
Sub-Tim Evaluasi Kinerja				
1.	Rahmawati Umasugi, S.Pi, M.Si	19771101 200312 2 004 Pembina IV/a	Perencana Ahli Muda	Koordinator
2.	Moh. Arief Hidayat, A.Md., S.Pi	19870216 201012 1 002 Penata Muda Tk.I III/b	Instruktur Pertama	Anggota
3.	Dessy Rompis, S.AP	19791222 200312 2 005 Penata Muda III/a	Pengelola Rencana Program dan Kegiatan	Anggota
4.	Fiona A.B Nikyuluw, S.Pi, M.Si	19750205 200212 2 004 Pembina IV/a	Instruktur Madya	Anggota
5.	Wahyu Retno Aris, S.St.Pi	19840530 201503 1 001 Penata Muda Tk.I III/b	Instruktur Pertama	Anggota
6.	Rachel L. Wattimena, S.Pi, M.Si	19730531 200604 2 007 Penata Tk.I III/d	Instruktur Muda	Anggota
7.	Johanna L. Thenu, S. Pi, MP	19770415 200502 2 001 Penata Tk.I III/d	WI Muda	Anggota
8.	Frajaya Ranto Dame, SE, M.Si	19641229 199403 1 001 Pembina Tk. I IV/b	WI Madya	Anggota
Sub-Tim Verifikasi Kinerja				
1.	Rahmawati Umasugi, S.Pi, M.Si	19771101 200312 2 004 Pembina IV/a	Perencana Ahli Muda	Koordinator
2.	Moh. Arief Hidayat, A.Md., S.Pi	19870216 201012 1 002 Penata Muda Tk.I III/b	Instruktur Pertama	Anggota
3.	Murni Samin	19771020 200604 2 009 Penata Muda III/a	Pengelola Kepegawaian	Anggota

4.	Rizky Irawan Attamimi, S.Kom	-	Tenaga Teknis	Anggota
5.	Soraya, S.Pi	-		Anggota

Untuk : 1. Sebagai tim teknis tata kelola kinerja BPPP Ambon Tahun 2024 (daftar penugasan terlampir);
2. Melaksanakan tugas mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Biaya : DIPA BPPP Ambon.

Ambon, 2 Januari 2024
Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon,



Abubakar, S.St.Pi.,M.Si

Lampiran I : Surat tugas Tim Teknis Tata Kelola Kinerja
BPPP Ambon

Nomor : B. 17/BPPP.AMB/KP.440/I/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

DAFTAR PENUGASAN TIM TEKNIS TATA KELOLA KINERJA
BPPP AMBON TAHUN 2024

No.	Jabatan dalam penugasan	Detail tugas
1	2	3
1.	Pengarah	Memberikan arahan dan bimbingan kepada Penanggung Jawab dan Pelaksana dalam perumusan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah strategis dalam rangka pelaksanaan tata kelola kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon.
2.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap tata kelola kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon.
3.	Pelaksana	<p>🚩 Ketua:</p> <p>Melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan verifikasi kinerja di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon.</p> <p>🚩 Sekretaris:</p> <p>Memberikan dukungan teknis dan administrative kepada Tim Teknis Tata Kelola Kinerja BPPP Ambon.</p> <p>🚩 Manajer Kinerja:</p> <p>Mengkoordinasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan verifikasi kinerja di lingkungan unit kerja yang bersangkutan untuk memastikan pengelolaan kinerja berjalan sesuai ketentuan</p> <p>🚩 Koordinator Sub-Tim:</p> <p>Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kegiatan Sub-Tim serta melaporkan hasil kepada Ketua Tim Pelaksana Kesekretariatan</p>
4.	Sub-Tim	<p>🚩 Sub-Tim Perencanaan Kinerja</p> <p>1) Memastikan bahwa</p> <p>a. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) / Rencana Kerja telah tersusun memuat :</p> <p>1. Visi, Misi, dan Program;</p> <p>2. Tujuan yang berorientasi hasil, indicator kinerja tujuan, dan target;</p> <p>3. Sasaran yang berorientasi hasil, indicator kinerja sasaran, dan target tahunan; serta Indikator Kinerja Utama (IKU).</p>

		<p>b. Indikator Kinerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Digunakan sebagai ukuran kinerja secara formal, baik indicator kinerja level III; 2. Indikator Kinerja eselon III telah selaras dengan IKU; 3. Indikator Kinerja memenuhi kriteria SMART-C; dan 4. Ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit organisasi. <p>c. Dokumen kontrak kinerja memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian Kinerja (PK): <ol style="list-style-type: none"> i. Tersusun dan selaras dengan dokumen Renstra dan PK atasannya; ii. Memuat target kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan; dan iii. Dilengkapi dengan matrik cascading untuk pedoman penyusunan PK level dibawahnya. 2. Peta strategi; 3. Rincian target IKU secara bulanan / triwulanan / semesteran / tahunan yang memuat metode perhitungan masing-masing IKU; 4. Matriks cascading kinerja organisasi level III 5. Pohon kinerja level III 6. Inisiatif strategi/rencana aksi atas PK. <ol style="list-style-type: none"> 2) Memastikan bahwa rencana aksi atas kinerja telah tersusun dan dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan; 3) Memastikan seluruh sasaran strategi, indikator kinerja, target, dan rencana aksi diinput kedalam system aplikasi pengelolaan kinerja; dan 4) Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing <p>🚩 Sub-Tim Pengukuran Kinerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun pedoman / mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja; 2) Melaksanakan pengukuran capaian IKU dan rencana aksi secara berjenjang dan berkala (bulanan/triwulan/semesteran/tahunan); 3) Memastikan seluruh hasil pengukuran capaian IKU dan rencana aksi diinput kedalam system aplikasi pengelolaan kinerja; dan 4) Mengkoordinasikan proses pengukuran kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing. <p>🚩 Sub-Tim Pelaporan Kinerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LCK) dan Laporan Kinerja (LKj) secara berkala (bulanan/triwulanan/semesteran/tahunan).
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none"> 2) Memastikan bahwa format dan substansi LKj telah disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku; 3) Memastikan LKj yang disusun telah dilengkapi dengan bukti/data pendukung yang cukup dan memenuhi unsur keterandalan; 4) Memastikan LKj yang disusun dismapikan tepat waktu dan di unggah ke dalam website resmi;dan 5) Mengkoodinasikan proses pelaporan kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing. <p>✚ Sub-Tim Evaluasi Kinerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan evaluasi dan analisa atas hasil pengukuran dan pelaporan kinerja; 2) Menyusun laporan hasil evaluasi program yang dilengkapi dengan rekomendasi dan alternatif perbaikan untuk perencanaan, pengendalian, dan peningkatan kinerja selanjutnya; 3) Melakukan evaluasi proses pengelolaan kinerja secara keseluruhan pada unit kerja di masing-masing sesuai ketentuan; 4) Menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak yang berkepentingan;dan 5) Mengkoordinasikan proses evaluasi kinerja secara berjenjang pada unit ogranisasi masing-masing. <p>✚ Sub-Tim Verifikasi Kinerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen hasil perencanaan kinerja; 2) Melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen hasil pengukuran kinerja; 3) Melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen hasil pelaporan kinerja; 4) Memastikan seluruh softcopy data, informasi, dan dokumen hasil perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta dokumen lainnya yang diperlukan disampaikan pada sistem dokumentasi online;dan 5) Mengkoordinasikan proses verifikasi kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing.
--	--	---

Ambon, 2 Januari 2024
Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon,



Abubakar, S.St.Pi.,M.Si



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PUSAT PELATIHAN DAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

BPPP AMBON